

Buletin BPIW Sinergi

Media Berita Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2016

**Terintegrasi dengan WPS, Anjungan Cerdas
Sarana Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah**



Edisi 04/April 2016



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Telp. +6221-7279 8112

www.bpiw.pu.go.id

[@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)

[Layanan Informasi BPIW](#)

Sinergi

Buletin BPIW

Pelindung:

A. Hermanto Dardak

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Hadi Sucahyono
Harris H. Batubara
Rezeki Peranginangin
Kuswardono

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shovich

Redaksi:

Etty Winarni
M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal
Maylinda Permatasari
Achiral Agustiansjah

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Andina Dwiky
Ichlasul Naufal
Dian Rosnawati

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: [@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)
Youtube: Layanan Informasi BPIW
No. Telp. +6221-7279 8112

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan April ini kita akan memfokuskan pada pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang telah berlangsung di Jakarta, 19 April lalu. Kabar Utama akan mengupas mengenai sejumlah program pembangunan infrastruktur PUPR 2017 yang telah disusun melalui sinkronisasi dan keterpaduan dari berbagai *stakeholder* terkait. Program 2017 ini telah dibahas dalam Pra Konreg di empat kota yakni Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar, Februari lalu.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai anjungan cerdas, yang menjadi salah satu program Kementerian PUPR, dimana perencanaannya disusun BPIW. Dalam laporan khusus ini dibahas beberapa hal, mulai dari latar belakang program anjungan cerdas hingga progress pelaksanaan program tersebut.

Dalam rubrik Wawancara menampilkan Kepala BPIW, Hermanto Dardak yang menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah pada program PUPR Tahun 2017.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan April, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan salah satu pantai di Maluku Tengah, yakni Pantai Ora. Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai tetap bugar saat melakukan perjalanan dinas, dan rubrik Glossary menampilkan istilah tentang lahan.

Kita berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

daftar isi

Edisi 04/April 2016



01 SALAM REDAKSI

04 DAFTAR ISI

05 PERSPEKTIF

Infrastruktur dan dukungan terhadap produk lokal

06 KABAR UTAMA

Konsultasi Regional Kementerian PUPR Hasilkan Rencana Program Infrastruktur Prioritas 2017 Berdasarkan Wilayah

20 WAWANCARA

Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc Program PUPR Tahun 2017 Maksimalisasi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah

24 TEROPONG MEDIA

Kementerian PUPR Dalam Media Cetak

26 KILAS BPIW

Lima Strategi Kementerian PUPR Dalam Membangun Infrastruktur di Papua

47 REVIEW

Seven Rules for Sustainable Communities

46 LAPORAN KHUSUS

Terintegrasi dengan WPS, Anjungan Cerdas Sarana Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah

52 OPINI

Infrastruktur dan Pengadaan Tanah

54 JALAN-JALAN

Pantai Ora: *Hidden Paradise* di Kota Ambon

56 WPS Corner

Wilayah Pertumbuhan Strategis 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa

58 INFOGRAFIS

Keterpaduan terhadap Pengembangan 15+2 Kawasan Industri (KI) Prioritas 2015-2019

60 TEKNOLOGI

The Greatest Teknologi Pencegah Longsor Buatan Anak Bangsa

62 POTRET

Konreg dan Agrinex 2016

64 GLOSSARY

Istilah Tentang Lahan

65 TIPS

Tetap Produktif Saat Dinas

66 TOKOH

Prof.Dr.Ir.Herry Suhardiyanto,M.Sc Infrastruktur Sektor Pertanian Perlu Dukungan Kementerian PUPR

Infrastruktur dan Dukungan Terhadap Produk Lokal

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dari pemerintahan saat ini. Anggaran besar pun digelontorkan pemerintah. Untuk Kementerian PUPR saja, tahun 2016 ini total anggaran mencapai Rp 104,081 triliun.

Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur saat ini bukan saja sebagai pilar, tapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga tidak terkena dampak ekonomi global yang melemah.

Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan dengan persaingan global, dimana telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan pemberlakuan MEA ini, maka satu negara dimungkinkan untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan pun sudah dilakukan, seperti pembangunan Jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 9,2 km, jalan tol Manado-Bitung dengan total panjang 39,9 km, dan delapan ruas Jalan tol Trans Sumatera sepanjang 504,59 km.

Bahkan program pembangunan infrastruktur tahun 2017 sudah disiapkan Kementerian PUPR, melalui proses Konsultasi Regional atau Konreg. Sebelum Konreg, terlebih dahulu dilakukan Pra Konreg di empat kota besar di Indonesia, yakni Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar.

Dari pelaksanaan empat kali Pra Konreg tersebut, didapat angka kebutuhan anggaran infrastruktur PUPR tahun depan, yakni mencapai Rp 166 triliun. Total kebutuhan anggaran tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dari total kebutuhan Rp 166 triliun itu, nanti akan dipertajam menjadi Rp 104 triliun, yakni berdasarkan pagu indikatif. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas dan akan dipertahankan Kementerian PUPR.

Kebutuhan anggaran sebesar Rp 166 triliun itu dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita, yaitu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp 38,6 triliun (23,3%), mendukung keseimbangan antar wilayah sebesar Rp 37 triliun (22,3%), mendukung kedaulatan energi dan pangan sebesar Rp 60,9 triliun (36,7%), serta mendukung peningkatan kualitas hidup sebesar Rp 29,4 triliun (17,7%).

Untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR telah melakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program, melalui pendekatan wilayah. Dengan demikian setiap kegiatan diorientasikan tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau suatu kawasan.

Untuk itu, Kementerian PUPR telah memformulasikan suatu konsep yang memberikan nilai tambah pada produk



lokal. Artinya produk lokal tersebut mendapat wadah untuk dipasarkan. Dengan demikian akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Apalagi rata-rata setiap daerah di Indonesia memiliki produk-produk khasnya masing-masing, baik itu produk kuliner, kerajinan tangan, maupun pakaian. Untuk itu produk-produk yang dihasilkan sangat penting untuk dipasarkan.

Saat ini Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tengah menggelirkan program Anjungan Cerdas. Program ini diadaptasi dari Konsep Michinoeki dari Jepang. Michinoeki ini adalah Road Side Station atau stasiun pelayanan pada sisi jalan, memiliki keunikan tersendiri, dimana didesain untuk membangun komunitas dan membangun hubungan antara komunitas lokal dan pengguna jalan. Selain itu sebagai tempat berbisnis bagi komunitas lokal. Anjungan cerdas tersebut dibangun di jalan nasional dan untuk peristirahatan bagi pengendara kendaraan bermotor.

Kementerian PUPR memfokuskan pembangunan anjungan cerdas di dua lokasi, yakni di Jembrana di Bali dan Trenggalek di Jawa Timur. Ditargetkan pada tahun 2018 mendatang, anjungan tersebut sudah dapat digunakan. Melalui anjungan cerdas segala potensi daerah dapat dipromosikan kepada para pengunjung. Produk kerajinan tangan khas daerah juga dapat dipasarkan melalui anjungan cerdas tersebut. Hal ini penting agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan anjungan cerdas perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Tanpa keikutsertaan pemerintah daerah, maka akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Selain pemerintah daerah, dalam membuat anjungan cerdas perlu partisipasi dari instansi terkait, seperti dinas pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, dan perindustrian.

Dengan anjungan cerdas ini menunjukkan pembangunan infrastruktur dapat mendukung pemasaran atau penjualan produk lokal. Hal ini perlu dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga bukan hal yang mustahil, produk lokal yang dipromosikan melalui anjungan cerdas tersebut, dapat berkembang dan bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Intinya, pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan yang dilakukan Kementerian PUPR akan terus mendorong perekonomian masyarakat sekitar sehingga dapat tumbuh dan berkembang.

Konsultasi Regional Kementerian PUPR Hasilkan Rencana Program Infrastruktur Prioritas 2017 Berdasarkan Kewilayahan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg), di Jakarta pada 19 April lalu. Saat pelaksanaan Konreg tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan BPIW telah menyusun program prioritas tahun 2017 berdasarkan kewilayahan. Dalam kesempatan itu ia juga menekankan tiga prioritas yang harus dilakukan pada era kompetisi saat ini, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, deregulasi untuk mempercepat semua perijinan, dan pengembangan sumber daya manusia.



Peserta Konsultasi Regional 2016

Sumber: Dok BPIW

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka satu negara dimungkinkan untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di selu-

ruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Hal inilah yang dimaksud oleh Basuki, sebagai era kompetisi tersebut. Dengan kondisi itu, Basuki selalu menekankan

mempercepat pembangunan infrastruktur agar Indonesia memiliki daya saing dengan bangsa lain.

“Melalui Konreg ini, saya ingatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, karena kita ingin menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperbesar daya beli masyarakat. BPIW sudah menyusun program prioritas berdasarkan kewilayahan, berdasarkan klaster. Hal ini dilakukan agar terjadi konektivitas antar daerah, dan menghilangkan disparitas antar wilayah,” tutur Basuki.

Pada pelaksanaan Konreg tersebut yang dihadiri sekitar 300 peserta ini mengambil tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keseimbangan Antar Wilayah, Mengembangkan Potensi Sumber Daya, serta Meningkatkan Produktivitas”.

Peserta yang hadir dari beberapa kalangan seperti satminkal di Kementerian PUPR, para pejabat, staf khusus, pejabat tinggi pratama, para tenaga ahli, kepala balai besar, kepala satker di empat satminkal utama, dan pejabat administrator.

Sebelum Konreg, telah dilakukan empat kali Pra Konreg di Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar Februari lalu. Pelaksanaan



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Memberikan Arahan pada Konsultasi Regional 2016

Sumber: Dok BPIW

Pra Konreg di empat tempat ini mencerminkan kewilayahan berbasis pulau. Pra Konreg tersebut menjadi wahana komunikasi antar satminkal di Kementerian PUPR, antar satminkal Kementerian PUPR yang ada di daerah, dan juga konsolidasi Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah.

Dari pelaksanaan empat kali Pra Konreg tersebut, didapat angka kebutuhan anggaran infrastruktur PUPR tahun depan, yakni mencapai Rp 166 triliun. Total kebutuhan anggaran tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. “Dari total kebutuhan Rp 166 triliun itu, nanti akan dicoba dijadikan Rp 104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong,” ungkap Basuki.

Pemotongan anggaran kegiatan ini, bisa dipotong secara vertikal dan horizontal. Menurut Basuki, pemotongan vertikal adalah suatu cara pemotongan, dimana total dana suatu proyek pembangunan infrastruktur, diurai pembiayaannya menjadi lebih dari satu tahun anggaran. Sedangkan pemotongan horizontal berarti dana suatu proyek pembangunan infrastruktur ditunda atau tidak dianggarkan, hingga terealisasinya anggaran

Rp 104 triliun tersebut.

Saat memberikan paparan pada kegiatan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menjelaskan kebutuhan anggaran sebesar Rp 104 triliun itu dibagi berdasarkan program untuk mendukung

entasikan tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau suatu kawasan,” ungkap Dardak.

Reorientasi mekanisme dan substansi penyusunan rencana dan program tersebut, berimplikasi pada investasi infrastruktur PUPR yang lebih efisien dan sebagai wahana mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, produktif dan efisien serta berkelanjutan, sehingga berdaya saing tinggi.

Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), mendorong terwujudnya spesialisasi seperti di kawasan industri dan komplementaritas seperti jalan tol.

“Dengan basis pengembangan wilayah, program PUPR lebih fokus dalam mendukung percepatan konektivitas, keseimbangan antar wilayah, ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas hidup,” ujar Dardak.

Tahun 2017 mendatang, Kementerian

“Melalui Konreg ini, saya ingatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, karena kita ingin menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperbesar daya beli masyarakat.” tutur Basuki.

empat agenda Nawacita, yaitu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 %), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp 37 triliun (22,3 %), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun (36,7 %), serta mendukung peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun (17,7 %).

“Mulai tahun ini telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program, melalui pendekatan wilayah, sehingga setiap kegiatan diori-



PUPR memiliki berbagai program yang mendukung pengembangan wilayah pada program prioritas nasional. Dukungan Kementerian PUPR yakni 17 KI (termasuk KI yang berada di KEK), 12 Kawasan Metropolitan, 11 KSPN (termasuk KSPN yang berada di KEK), 13 Kawasan Perkotaan Baru (perumahan-permukiman), 10 Kawasan Perbatasan, 34 kawasan prioritas lain dan antar wilayah di luar WPS.

Berikut Rekapitulasi Program Kementerian PUPR Tahun 2017 per pulau di Indonesia, yang dipaparkan Kepala BPIW, Hermanto Dardak pada saat Konreg tersebut :

SUMATERA

Program Utama yang Mendukung Peningkatan Konektivitas dan Keseimbangan Antar Wilayah

Beberapa program utama di Pulau Sumatera yang mendukung peningkatan konektivitas dan keseimbangan antar wilayah yakni :

Pembangunan 10 ruas Tol Trans Sumatera

Pembangunan 10 ruas tol Trans Sumatera ini sepanjang 820,6 km. Saat ini pembangu-

nannya sedang dalam tahap konstruksi hingga tahun 2017. Ke-10 pembangunan jalan tol Trans Sumatera tersebut adalah Terbanggi Besar – Bakauheni sepanjang 150 km, Pematang Panggang – Terbanggi Besar sepanjang 100 km, Kayu Agung – Pematang Panggang

– Kisaran sepanjang 60 km, Medan – Kualahanuru – Tebing Tinggi sepanjang 61,7 km, dan Medan – Binjai sepanjang 16,72 km.

Pembangunan Jalan Nasional Non Tol

Untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan tol non tol yakni pembangunan jalan ring road kecil Mandeh-Sungai Pinang, Jalan Sudirman Pandan Perawas, Jalan Manggopoh Batas Kota Pariaman, Jalan Kambang – Inderapura, dan pembangunan Jalan Kuraitaji – Lubuk Alung.

Program Utama yang Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Untuk program pembangunan infrastruktur di pulau Sumatra yang mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi, yakni :

Pembangunan Bendungan

Pada tahun 2017 pembangunan waduk di Pulau Sumatera ini ada 4 bendungan, yakni Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, Bendungan Keureto, dan Bendungan Way Sekampung

Pembangunan irigasi Baru

Terkait pembangunan irigasi baru di pulau

Sebelum Konreg, telah dilakukan empat kali Pra Konreg di Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar Februari lalu. Pelaksanaan Pra Konreg di empat tempat ini mencerminkan kewilayahan berbasis pulau. Pra Konreg tersebut menjadi wahana komunikasi antar satminkal di Kementerian PUPR.

sepanjang 85 km, Palembang – Indralaya sepanjang 24,48 km, dan Betung – Palembang – Kayuagung sepanjang 111,69 km. Selanjutnya, jalan tol Palembang – Tanjung Api-api sepanjang 76 km, Dumai – Kandis – Pekanbaru sepanjang 135 km, Tebing Tinggi

ini, terdiri dari pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat, Jaringan Irigasi D.I. Serdang, pembangunan Jaringan Irigasi DI Batang Toru. Selain itu juga dibangun D.I. Sawahlawe Terusan, pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar, pembangunan D.I. Batang Bayang, dan pembangunan Daerah Irigasi Jabung Lampung Timur.

Pembangunan Bendung dan Embung

Untuk pembangunan bendung dilakukan di empat bendung, yakni Bendung D.I. Sitakurak Kabupaten Tapanuli Tengah, Bendung D.I. Sei Wampu Kab Langkat, Bendung Sei Padang D.I. Bajayu D.I. Paya Lombang dan D.I. Langau, dan Bendung dan Jaringan D.I. Sidilanitono Kab Tapanuli Utara. Kemudian dua embung yang dibangun adalah Embung Talago Tampirak dan Embung Lurah Jarek.

Program Utama Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Untuk program utama mendukung peningkatan kualitas hidup berupa :

Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pembangunan terkait penyediaan SPAM, yakni pengembangan SPAM Perkotaan Tanjung Pandan. Selain itu juga dilakukan pengembangan jaringan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan SPAM Ibukota Kecamatan (IKK) Sako Tapan, pembangunan SPAM IKK Inderapura Kecamatan Pancung Soal pengembangan SPAM Regional Mebidangro, dan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Percut Sei Tuan.

Perumahan

Program pembangunan perumahan di Pu-

lau Sumatera ini yakni : rumah khusus nelayan Kabupaten Agam, pembangunan rumah susun di Kota Bengkulu, penyediaan rumah susun di Kota Medan, pembangunan rumah khusus korban bencana Gunung Sinabung, dan pembangunan rumah susun pekerja di Sei Mangkei

Infrastruktur menjadi tulang punggung wilayah pertumbuhan mendukung pengembangan Pulau Sumatera, dimana meng-

Beberapa program pembangunan yang direncanakan di KEK Sei Mangke seperti pelebaran Jalan Mayang Sei Mangke, preservasi dan pelebaran Jalan di Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Parapat, serta preservasi dan pelebaran Jalan Tebing Tinggi, P. Siantar, dan Parapat

hubungkan empat WPS, delapan PKN, enam pelabuhan internasional dan delapan bandara.

Pada tahun 2017 akan dibangun jalan tol terpadu Bakauheni Terbanggi Besar. Pada sisi kanan dan kiri jalan tol tersebut, juga dibuat space khusus untuk jalur kereta api dengan lebar 30 meter dan jalur utilitas dengan lebar yang sama yakni 30 meter. Utilitas yang bisa ditempatkan di box khusus ini seperti kabel PLN, pipa air minum, dan pipa gas. Dengan cara ini, maka utilitas yang ada lebih tertib pengaturannya dan tidak lagi perbaikkan pipa di sembarang tempat.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo)

Pembangunan infrastruktur di Kawasan

Metropolitan Mebidangro dilakukan secara terpadu berupa pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Serdang, pembebasan lahan D.I. Serdang, dan pembangunan Bendung Sei Padang. Selain itu program rekonstruksi Jalan Lingkar Luar Binjai dan rekonstruksi Jalan Batas Kota Binjai Batas Kota Medan.

Keterpaduan Program Utama KEK Sei Mangke

Beberapa program pembangunan yang direncanakan di KEK Sei Mangke seperti pelebaran Jalan Mayang Sei Mangke, preservasi dan pelebaran Jalan di Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Parapat, serta preservasi dan pelebaran Jalan Tebing Tinggi, P. Siantar, dan Parapat. Selanjutnya direncanakan pembangunan berupa S.I.D. Penyediaan Air Baku untuk KEK Sei Mangke, dan pembangunan saluran Suplesi dari D.I. Silau ke Bunut. Kemudian direncanakan pembangunan SPAM terfasilitasi PDAM Tirta Lihou, dan pembangunan Intake

dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku. Tidak hanya itu, juga akan dilakukan pembangunan Flyover Sp Inalum, yang mana pada tahun ini telah dilakukan Pra Studi Kelayakan. Selain itu direncanakan pelebaran simpang dan pembangunan Flyover Perlintasan Kereta Api Lima Puluh, dan pembangunan rumah susun pekerja KEK Sei Mangkei yang dapat menampung sekitar 5.000 pekerja.

Keterpaduan Program Utama KSPN Danau

TOBA

Danau Toba merupakan onyek pariwisata yang akan dikembangkan untuk menarik wisatawan baik dalam maupun mancanegara. Untuk mendukung itu perlu pengembangan Danau Toba dan kawasan sekitarnya. Beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan seperti pembangunan rumah



Pembangunan infrastuktur Sinabung Slosar Medan

Sumber: Kemen PUPR



Harris Hasungan sedang memberikan paparan

Sumber: Dok BPIW

husus korban bencana Gunung Sinabung di desa sekitarnya, pelebaran Jalan Tele - Pangururan - Nainggolan - Onan Runggu, dan pelebaran Jalan Pangururan - Ambarita - Tomok - Lagundi - Onan Runggu.

Kemudian juga dilakukan penyusunan RTBL Kawasan Wisata Lagundi Desa Sita-miang Kecamatan Onanrunggu dan penyusunan RTBL Kawasan Wisata Danau Sidihoni Kec Ronggornihuta Kabupaten Samsir. Selain itu akan dilakukan Studi Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Toba Tersebar, normalisasi Saluran Tanah Ponggol, dan Pembangunan Embung di Kab. Samsir (Pea Nauli Parsinagaan, Pea Rihit, Pea Tahoran, Pea Nadea, Julu Ni Aek). Selanjutnya direncanakan pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pariwisata Danau Toba, dan pengembangan kawasan Danau Toba.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (Palapa) dan Kota Baru Padang

Beberapa program untuk Kawasan Metropolitan Palapa dan Kota Baru Padang yakni program Rekonstruksi Lubuk Selasih - Bts. Kota Padang, pembangunan Jalan Manggopoh Batas Kota Pariaman, pembangunan Jalan Kambang - Inderapura, pembangunan Jalan Kuraitaji - Lubuk Alung, dan pembangunan Jalan Ring Road Akses Pariwisata Mandeh-Sungai Pinang. Kemudian juga direncanakan pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TEST)/Shelter, SPAM IKK Inderapura Kecamatan Pancung Soal, SPAM IKK Sako tapan, dan penataan infrastruktur kawasan kumuh Pariaman Tengah. Selanjutnya, direncanakan pemban-

gunan sarana dan prasarana pengamanan Pantai Bayang dan pengendali banjir Batang Kuranji. Selain itu direncanakan pembangunan rusunawa MBR Kota Padang dan rumah susun PNS DPU Provinsi.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung- (Patung Raya Agung)

Program yang direncanakan akan dilaksanakan di kawasan ini seperti perkuatan Tebing Sungai Musi, Daerah Aliran Sungai Bendung Kota Palembang, pembangunan Tol

kebutuhan anggaran sebesar Rp 166 triliun itu dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita, yaitu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 %), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp 37 triliun (22,3 %), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun (36,7 %), serta mendukung peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun (17,7 %).

Palembang-Tanjung Api-api (tahap Detail Engineering Design atau DED/pembebasan lahan), dan Lingkar Timur dalam Kota Palembang (tahap DED, pembangunan Jembatan Musi III (tahap DED dan pembebasan lahan). Kemudian dilakukan pembangunan Jalan Tol Pematang - Panggang - Kayu Agung Pembebasan Lahan.

Selanjutnya akan dilakukan normalisasi Sungai Komering, PSD Kawasan Kumuh Kota Palembang, penataan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Jakabaring Kecamatan

Seberang Ulu dan pembangunan rumah susun di Jakabaring.

PULAU JAWA

Program Utama yang Mendukung Peningkatan Konektivitas dan Keseimbangan Antar Wilayah

Untuk mendukung konektivitas dan keseimbangan antar wilayah di Pulau Jawa, beberapa pembangunan jalan tol yang direncanakan tahun 2017, seperti Jalan Tol Cisumdawu Phase 1, Solo - Kertosono Ruas Colomadu - Karanganyar, dan Semarang-Solo Ruas Bawen - Solo. Selain itu juga akan dibangun Jogja Outer Ring Road Ruas Utara dan pembangunan Jalan Baru Temon Bugel.

Pembangunan jalan tol Trans Jawa merupakan upaya peningkatan konektivitas antar kawasan di Pulau Jawa. Saat ini pembangunan Trans Jawa belum tersambung, karena masih ada yang belum tuntas, yakni di di Bukit Tanggul Daerah Tidar Malang. Sementara untuk kawasan lain seperti di Provinsi Banten dan Jawa Barat sudah tersambung.

Program yang Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Guna mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi, beberapa rencana program pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa telah disusun rencana pembangunan, seperti pembangunan Bendungan Karian (program ini merupakan program lanjutan), Bendungan Sidangheula (program ini juga program Lanjutan), SPAM Gembung dan Kertasari Bendungan Bener Kabupaten Purworejo, Pipa Transmisi IKK Kabupaten Lumajang.

Program lain yang akan dilaksanakan yakni pembebasan tanah Bendungan Matenggeng Tahap I, pembangunan Bendungan Sadawarna Kabupaten Subang, Bendungan Tugu Ongoing Kabupaten Trenggalek dan pembebasan tanah Bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk.

Program yang Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Untuk Pulau Jawa, beberapa program yang disiapkan terkait program yang mendukung peningkatan kualitas hidup seperti pembangunan SPAM Perkotaan di Subang. Kemudian juga dibangun SPAM regional seperti SPAM Regional Mojokerto-Lamongan dan SPAM Regional Keburejo- Kebumen. Selain itu juga dibangun Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Skala Regional Kota Bogor, Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan Lingkungan Kota Pekalongan, dan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional. Tidak hanya pembangunan yang baru direncanakan, infrastruktur yang belum selesai pengerjaannya juga dilakukan seperti pada pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)



Legok Nangka.

Kemudian juga diprogramkan pembangunan Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Kab. Bantul dan Pembangunan Kawasan Panggul Trenggalek. Pembangunan rusunawa juga dilakukan seperti rusunawa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dan Kemayoran. Pembangunan rusunawa juga dilakukan di Surabaya dan Malang. Bantuan stimulan perumahan swadaya juga diberikan untuk Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cianjur.

Keterpaduan Program Utama KSPN Tanjung Lesung

Untuk program-program kawasan tematik seperti mendukung KSPN Tanjung Lesung, dilakukan beberapa program seperti pelebaran Jalan Citereup- Tanjung Lesung dan peningkatan Jalan Lintas Selatan Banten- Citereup - Sp Malingping- Bayah - Pelabuhan Ratu - Cidaun.

Dalam program keterpaduan KSPN Tanjung Lesung ini juga dilakukan beberapa pembangunan di Pandeglang seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Cigeulis, penataan kawasan kumuh Panimbang dan Kawasan Sukaresmi, dan pembangunan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Saketi.

Keterpaduan Program Utama Kota Baru Maja

Kementerian PUPR mendukung pengembangan Kota Baru Maja yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bentuk dukungan tersebut diantaranya pembangunan Jalan Strategis Pamulang AEON Serpong-Setu-Parung Panjang-Maja sepanjang 87 km. Untuk jalan strategis Pamulang tersebut sudah dilakukan feasibility study atau studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). Untuk langkah selanjutnya telah disiapkan MoU atau nota kesepakatan pembangunan tersebut.

Dengan keterpaduan pembangunan yang dilakukan, menimbulkan dampak positif berupa jarak tempuh yang semakin singkat. Misalnya jarak dari Merak hingga Selatan Banten, yang dulunya ditempuh dalam waktu 5-6 jam, maka saat ini dapat ditempuh

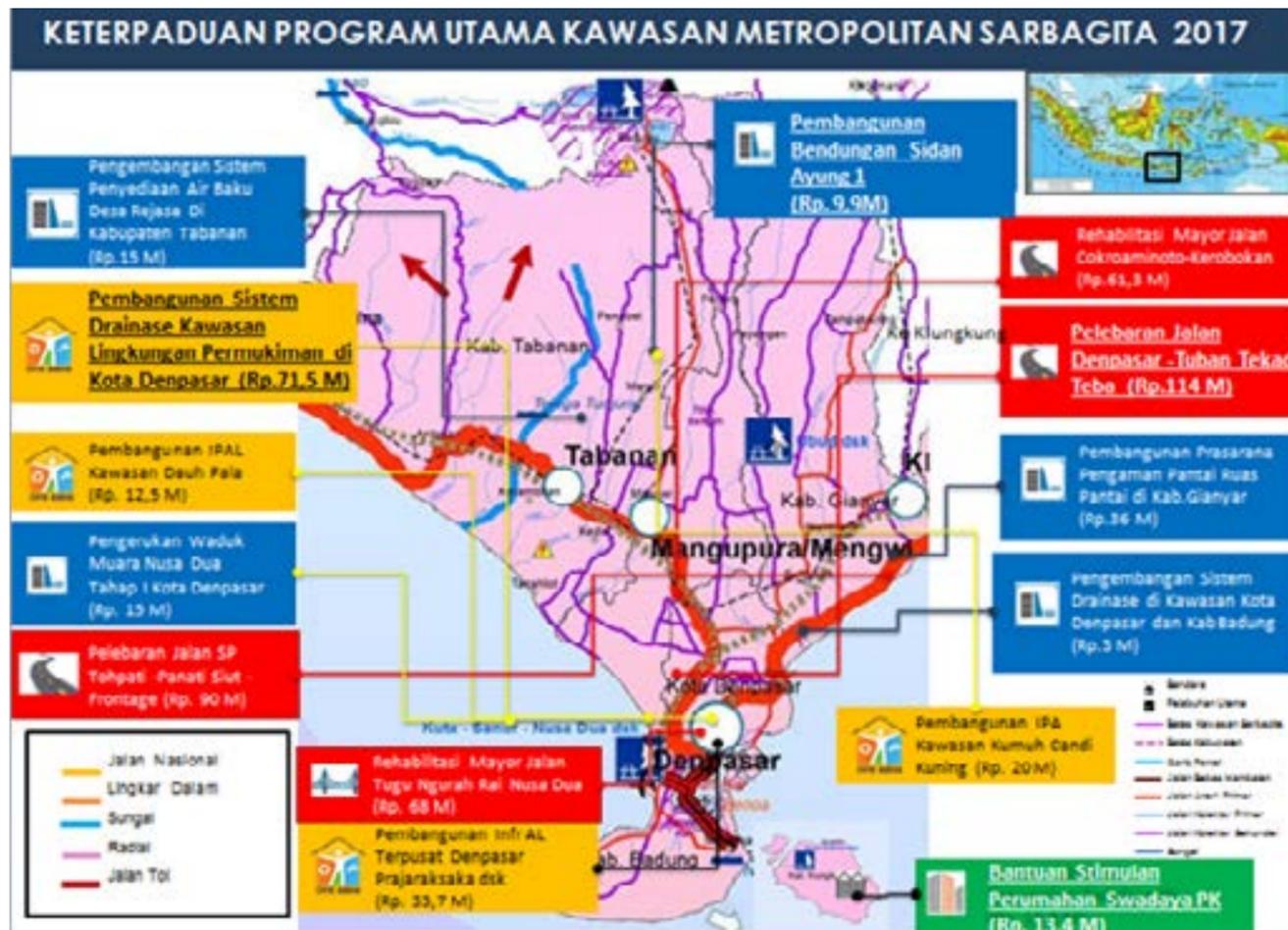
sekitar 3 jam saja. Pada lebaran nanti, jalan lewat selatan ini dapat menjadi alternatif bagi pengendara kendaraan bermotor.

Pembangunan Jalan Tol Kunciran Serpong dan Jalan Tol Serpong Balaraja Seksi 1 dan Seksi 2 Serpong-Legok sudah dianggarkan terutama untuk pembebasan lahan.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Jabodetabek

(Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) Beberapa program yang direncanakan seperti Pembangunan IPAL di Kemayoran. Pembangunan IPAL ini untuk mendukung rencana pembangunan rumah susun di daerah tersebut. Selain itu juga telah dilakukan pembebasan lahan Waduk Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan bebas hambatan akses Tanjung Priok Akses menuju Dry Port di Cikarang dan Pembangunan Rusunawa (twin block) di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian juga dilakukan peningkatan kapasitas ruas Marunda dan Cakung Drain.

Keterpaduan Program Utama Kota Baru



Kemayoran

Untuk pembangunan Kota Baru Kemayoran, secara khusus akan dibangun pembangunan rusunawa dan rusunami di Blok C2. Pembangunan rusunawa dan rusunami ini untuk relokasi Kalibaru dan pembangunan rusunawa dan rusunami di kota baru Kemayoran Blok D 10. Selain itu juga dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Untuk mendukung pelaksanaan Asian Games yang akan dilaksanakan 2018 mendatang, dilakukan penataan Kawasan Wisma Atlit. Pengembangan transportasi publik berupa Busway Selatan-Utara dan angkutan kota juga dilakukan untuk mendukung kota baru tersebut.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Bandung Raya (Bandung-Bandung Barat-Cimahi)

Beberapa pembangunan infrastruktur terkait keterpaduan Kawasan Metropolitan Bandung Raya antara lain penangan banjir perkotaan di Dayeuh Kolot dan lanjutan pembangunan Floodway Cisangkuy Kabupaten Bandung. Penanganan banjir di

Dayeuh Kolot mempunyai peran penting dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian pembangunan jalan bebas hambatan tol Bandara Kertajati-Cisumdawu. Kemudian

“Percepatan pembangunan perkotaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Menata kota merupakan refleksi mozaik atau refleksi seni dari pembangunan infrastruktur yang semestinya dapat mengatasi pertumbuhan penduduk di perkotaan,” ujar Dardak.

juga dibangun SPAM MBR di Rancaekek.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Dukungan terhadap Kawasan Perkota-

an Yogyakarta antara lain pengembangan Drainase Lingkungan Kota Yogyakarta, Pembangunan rumah susun Kawasan Sungai Winongo Kota Yogyakarta, dan Preservasi Yogyakarta Bts Kota Bantul. Selain itu juga akan dilakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan Kota Yogyakarta, pembangunan SPAM Regional Kartamantul.

Keterpaduan Program Utama Mendukung Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kota Maritim Prigi Jawa Timur

Beberapa program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelabuhan perikanan dan Kota Maritim Prigi, seperti S.I.D. pengamanan Pantai Selatan Kabupaten Trenggalek dan pembangunan Jalan Pantai Selatan Panggul- Prigi-Karangongso, serta perbaikan Sungai Madiun dan Anak anak Sungaiinya di Kabupaten Madiun.

Selain itu juga disiapkan pembangunan berupa penyediaan perumahan rakyat dalam mendukung pembangunan inkubasi kawasan Ponorogo- Trenggalek- Tulungagung- Prigi Panggul- Popoh, peningkatan

kualitas rumah swadaya, dan penyediaan perumahan rakyat dalam mendukung pembangunan kota baru Prigi.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Prioritas Lingkar Wilis

Kawasan Lingkar Wilis menjadi bagian enam kabupaten yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.

Beberapa pembangunan yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2017 di kawasan prioritas ini antara lain lanjutan pembangunan Bendungan Bendo, pembangunan Jembatan Ngadiluwih Kediri Akses ke Lingkar Wilis, pembangunan Jembatan Ngujang II, dan pembangunan IPLT Kabupaten Ponorogo. Selain itu pembangunan Bendungan Tugu seluas 10 Ha, Pelebaran Jalan Bts Kota Tulungagung - Bts Kab Blitar Kabupaten Tulungagung, dan perbaikan Sungai Madiun dan anak- anak Sungaiinya di Kabupaten Madiun.

PULAU BALI

Keterpaduan Program Utama Kawasan Met-

ropolitan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)

Beberapa rencana pembangunan kawasan Metropolitan Sarbagita seperti pelebaran Jalan SP Tohpati -Panati Siut - Frontage, pelebaran Jalan Denpasar -Tuban- Tekad Teba, dan pembangunan Sistem Drainase

“Mulai tahun ini telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program, melalui pendekatan wilayah, sehingga setiap kegiatan diorientasikan tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau suatu kawasan,” ungkap Dardak.

Kawasan Lingkungan Permukiman di Kota Denpasar. Selain itu diprogramkan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Ruas Pantai di Kabupaten Gianyar, Pembangunan Bendungan Sidan Ayung 1, dan rehabilitasi Mayor Jalan Tugu Ngurah Rai Nusa Dua.

NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Program Utama Mendukung Peningkatan Konektivitas

Program yang disiapkan untuk mendukung peningkatan konektivitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni pembangunan tiga jembatan yakni jembatan Kali Babak, Meninting, dan Dodokan. Selain itu program pembangunan pemeliharaan dan pelebaran jalan yang terdiri dari pemeliharaan Jalan Mantang-Kupang dan Rekonstruksi Jalan Raya Sengkol-Kuta. Salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Mandalika yang menjadi pusat pertumbuhan di sebelah Selatan daerah tersebut, dimana aksesnya ditingkatkan.

Program Utama Mendukung kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Dalam hal untuk kedaulatan pangan, air, dan energi terutama pembangunan tiga bendungan yang merupakan program lanjutan tahun 2015 lalu. Ketiga pembangunan bendungan tersebut adalah Bendungan Tanju (18,27 juta m3), Bendungan Mila (6,57 juta m3), dan Bendungan Bintang bano (65,84 juta m3).

PROGRAM KEPULAUAN NTB 2017

Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup



Program Utama Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Terkait peningkatan kualitas hidup ini, akan dilaksanakan tiga program yakni pembangunan SPAM di kawasan pariwisata dan Kota Mataram, penataan kawasan Mataram Metro, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Prapen, Triwugalih, Eneng, Penujak, Montongmiane, Tanak Awu, dan Batuajai Kabupaten Lombok Tengah

Selain itu juga ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PK di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PK Kabupaten Lombok Tengah.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Mataram Raya

Untuk Metropolitan Mataram Raya, Kementerian PUPR mendukung pariwisata di sisi barat dengan melakukan penanganan pantai dan juga pembangunan SPAM di Kota Mataram. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan Jembatan Kali Babak dan pembangunan Embung Rakyat di WS Lombok.

NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Program Utama Mendukung Peningkatan Keseimbangan Wilayah

Pembangunan jalan yang akan dilakukan seperti Malanusa – Boubou – Bajawa sepanjang 4,38 Km, Laktutus – Motomasin sepanjang 4,38 Km, dan Labuan Bajo – Bo-

“Dengan basis pengembangan wilayah, program PUPR lebih fokus dalam mendukung percepatan konektivitas, keseimbangan antar wilayah, ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas hidup,” ujar Dardak.

leng – Terang sepanjang 6 Km. Kemudian antar WPS dibangun 10 pembangunan diantaranya pembangunan Jalan Seba-Mesara, Jalan Strategis dan Akses Perbatasan Ruas Kapan-Nenas-Sutual, Jalan Waiwadan-Lite-Wae Werang, dan Jalan Lato-Kawaliwu-Waiwio.

Program Utama Kepulauan NTT Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Infrastruktur yang direncanakan dibangun yakni bendungan di tiga titik, yakni Bendungan Raknamo (pembangunan lanjutan 2015), Bendungan Rotiklod (pembangunan lanjutan 2015), dan Bendungan Kolhua. Selanjut juga direncanakan pembangunan Jaringan Irigasi di 7 lokasi, Pengamanan Pantai 3 Kab/kota, dan pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir sepanjang 20 Km.

Program Utama Kepulauan NTT Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Pembangunan antar WPS direncanakan ada empat yang akan dibangun, pertama, penanganan Perbatasan Laut Rote Selatan Kabupaten Rotendao, kedua, penanganan Perbatasan Laut Pureman Kabupaten Alor, ketiga, penanganan Perbatasan Laut Mataru Kabupaten Alor, dan penanganan Perbatasan Laut Raijua Kabupaten Sabu Raijua.

Kemudian, direncanakan pembangunan Rumah Khusus di 3 lokasi di Pulau Timor dan pembangunan 1 unit Rumah Susun di Kota Kupang. Selain itu juga direncanakan pem-



Pembangunan Bendungan Raknamo di NTT

Sumber: Kemen PUPR

angunan Tempat Pemrosesan Akhir di 1 lokasi, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah di 3 lokasi, dan pembangunan SPAM di 2 lokasi.

Keterpaduan Program Utama PKSN Atambua NTT

Beberapa program pembangunan yang direncanakan yakni pembangunan Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu, pembangunan Jalan Sp.Nurobo-Sp.Umasukaer-Sp.Motamasin-Batas Timor Timur, dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota Atambua.

KALIMANTAN

Program Utama Mendukung Peningkatan Konektivitas dan Keseimbangan Antar Wilayah

Terkait program mendukung peningkatan konektivitas dan keseimbangan antar wilayah, 13 ruas jalan sepanjang 703 Km dilanjutkan mulai dari Temajo Kalimantan Barat. Penanganan perbatasan di Kalimantan termasuk pos lintas batas. Jalan tol sepanjang 99,02 Km yang akan dibangun mulai dari Balikpapan hingga Samarinda. Selain itu juga akan dibangun jalan dan jembatan seperti pembangunan Jalan Lingkar Dalam Batulicin II, pembangunan Jembatan Landak II, pembangunan Jalan Temajuk – Aruk, dan pembangunan Jembatan Landak II.

Program Utama Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Untuk program utama mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi di Kalimantan akan dibangun waduk seperti pembangunan Waduk Marangkayu berkapasitas 12,3 juta m³. Manfaat dibangunnya waduk Marangkayu ini adalah untuk irigasi mencapai 4.500 Ha, air baku 0,45 m³/det, dan dapat menghasilkan listrik mencapai 1,35 MW.

Selain itu akan dibangun empat Intake air

13 ruas jalan sepanjang 703 Km dilanjutkan mulai dari Temajo Kalimantan Barat. Penanganan perbatasan di Kalimantan termasuk pos lintas batas. Jalan tol sepanjang 99,02 Km yang akan dibangun mulai dari Balikpapan hingga Samarinda.

baku yakni Loa Kulu IPA Lok Bahu Kota Samarinda, Intake Air Baku Kotawaringin Barat, Intake Air Baku Kota Ketapang, dan Intake Air Baku Sungai Potan Kabupaten Kapuas Hulu.

Program Utama Pulau Kalimantan Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Terkait peningkatan kualitas hidup, program pembangunan infrastruktur yang direncanakan tahun 2017 antara lain pembangunan Kota Baru Tanjung Selor Kalimantan Utara dan pembangunan dua SPAM Regional. Pembangunan Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) akan dibangun di tiga tempat yakni PLBN Aruk (4.118 m²), Entikong (19.493 m²), dan PLBN Nanga Badau (7.618 m²) di Kalimantan Barat.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Banjarnakula

Program utama Metropolitan Banjarnakula (Banjarmasin, Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut) antara lain pembangunan Jembatan Sei Tatah Bangkal, Normalisasi Sungai Jafri Zamzam Kota Banjarmasin, dan Rehabilitasi Mayor Jalan Ahmad Yani di Banjarbaru. Selain itu juga akan dibangun Pembangunan IPAL Kawasan Kota Banjarbaru dan Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Sungai Ulin dan Banjarbaru Utara.

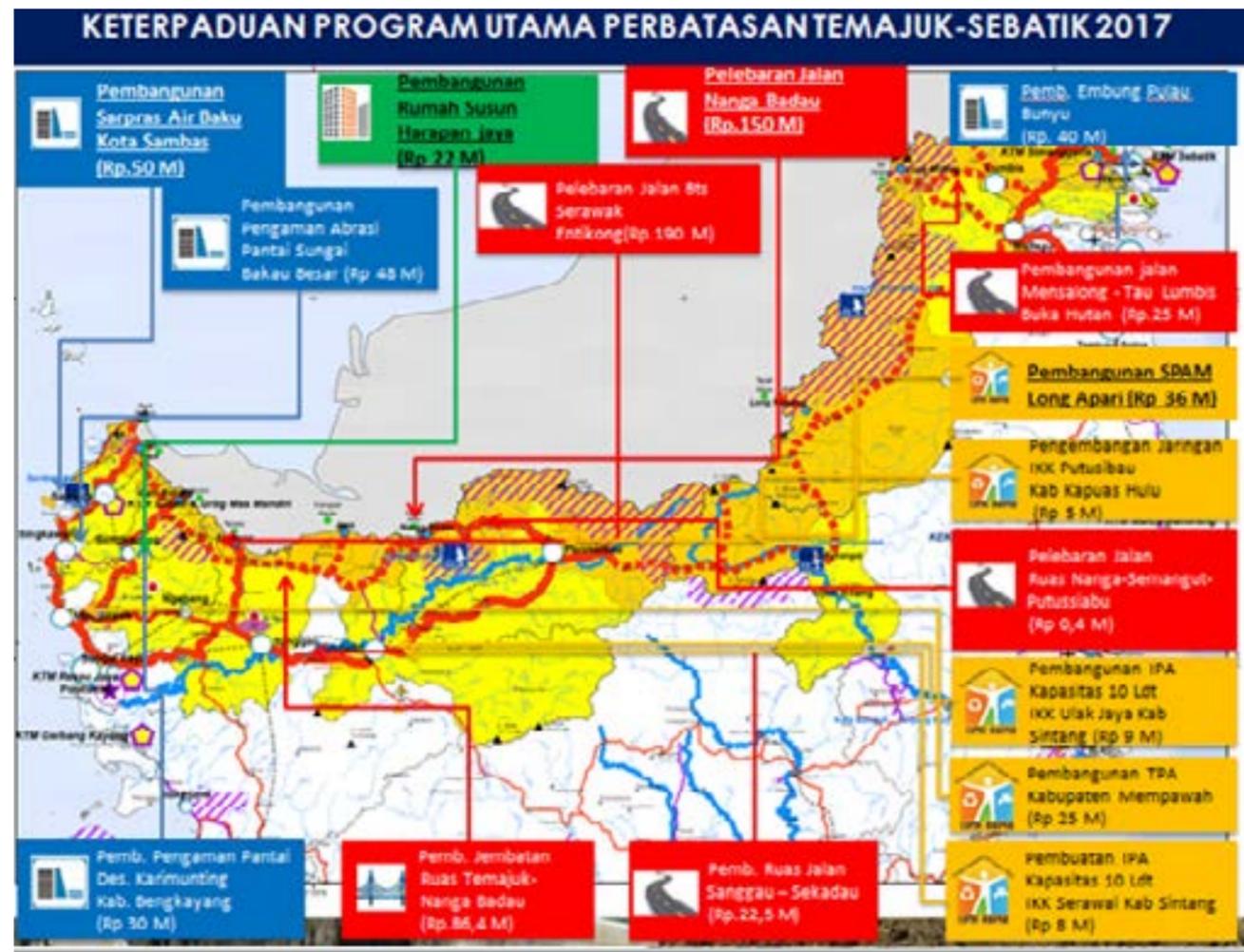
Keterpaduan Program Utama Kawasan Industri Prioritas Batulicin

Untuk Kawasan Industri di daerah ini, dukungan dari Kementerian PUPR terkait beberapa pembangunan infrastruktur seperti peningkatan Jalan Bts Kab Tanah Bumbu Mentewe –Longsoran, pembangunan Jalan Lingkar Dalam Batulicin II, dan pembangunan Flood Control di Kecamatan Simpang Empat Karang Bintang.

Keterpaduan Program Utama Kota Baru Tanjung Selor

Untuk pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, akan dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti Preservasi Jalan Tj.Palás – Sekatak, pembangunan Penge-





dali Banjir dan Saluran Outlet Kawasan Bandar Udara Sungai Selor, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan Pembangunan Gedung PIP2B Kawasan Tanjung Selor.

Selain itu akan dilakukan rehabilitasi minor pada Ruas Sengkawit - Tj Selor, pelebaran jalan pada Bts. Bulungan - Tanjung Selor, dan pembangunan Kanal Banjir Bronjong Kecamatan Tanjung Selor. dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL Terpusat Skala Kota.

Keterpaduan Program Utama Perbatasan Temajuk-Sebatik

Untuk mendukung keterpaduan, program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan seperti pembangunan Rumah Susun Harapan Jaya, dan pelebaran Jalan Bts. Serawak Entikong, pelebaran Jalan Nanga Badau. Selain itu pembangunan Jembatan Ruas Temajuk-Nanga Badau, dan pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sungai Bakau Besar.

Keterpaduan Program Utama KTM Gerbang

Kayong

Beberapa program yang akan dijalankan pada keterpaduan program utama KTM Gerbang Kayong adalah pembangunan Sa-

Untuk pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, akan dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti Preservasi Jalan Tj.Palas - Sekatak, pembangunan Pengendali Banjir dan Saluran Outlet Kawasan Bandar Udara Sungai Selor

rana dan Prasarana Air Baku Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, pembangunan Pengaman Pantai Kecamatan Sukadana, Pengembangan Jaringan IKK Seponti Kab Kayong Utara, dan pembangunan Reservoir di SPAM Seponti.

SULAWESI

Program Utama Mendukung Peningkatan Konektivitas

Ada delapan program pembangunan jalan dan jembatan yang akan dilakukan tahun depan, yakni pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu, pembangunan Fly Over Pantoloan, dan pembangunan Jembatan Bobo. Kemudian, pembangunan Jalan Boulevard II Manado, pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road Makassa, pembangunan Underpass Simpang Mandai, dan Bypass Mamminasata.

Selanjutnya, pemeliharaan dan pelebaran jalan seperti pemeliharaan preventif Jalan Wolter Monginsidi Bitung, rekonstruksi Jalan Bahadopi Batas Sultra Gempang - Pameuh, pelebaran Jalan Bts. Kabupaten Konawe Utara - Pohara, pelebaran Wawotobi - Bts. Unaaha Pohara, dan pelebaran Jalan Pohara - Bts Kota Kendari. Selain

itu rekonstruksi Jalan Wanci Tapanwanda Jalan Masuk Bandara Sugimanuru, peningkatan Jembatan Pesawangan, peningkatan Jembatan S Tondano, dan penggantian Jembatan Leuea V.

Program Utama Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi di Pulau Sulawesi direncanakan pembangunan bendungan, bendung, dan embung. Untuk pembangunan bendungan, ada empat program, yakni pembangunan Bendungan Karalloe (program lanjutan), Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar, Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, dan pembangunan Bendungan Paselloreng program lanjutan).

Kemudian empat program pembangunan Bendung yang akan dilakukan yakni pembangunan Bendung D.I. Salugan, Bendung D.I. Sausu Bawah, Bendung D.I. Gilireng, dan Bendung D.I. Baliase Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya ada tiga rencana pembangunan embung yakni pembangunan Embung Toraja, Embung Kabupaten En-

rekang, dan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe.

Program Utama Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup program yang direncanakan adalah pembangunan IPAL, SPAM, dan penanga-

Dengan keterpaduan untuk membangun Metropolitan Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado) maka akan dibangun beberapa infrastruktur seperti Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (program lanjutan), dan Pengendalian Banjir Sungai Tondano di Kota Manado.

nan kumuh. Terkait pembangunan IPAL yakni pembangunan IPAL Losari. Kemudian untuk pembangunan SPAM yakni Pembangunan SPAM di Kawasan Perbatasan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya untuk penanganan kumuh adalah peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Ku-

muh Kawasan Rappokalling.

Keterpaduan Program Utama Metropolitan Bimindo

Dengan keterpaduan untuk membangun Metropolitan Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado) maka akan dibangun beberapa infrastruktur seperti Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (program lanjutan), dan Pengendalian Banjir Sungai Tondano di Kota Manado.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Metropolitan Mamminasata

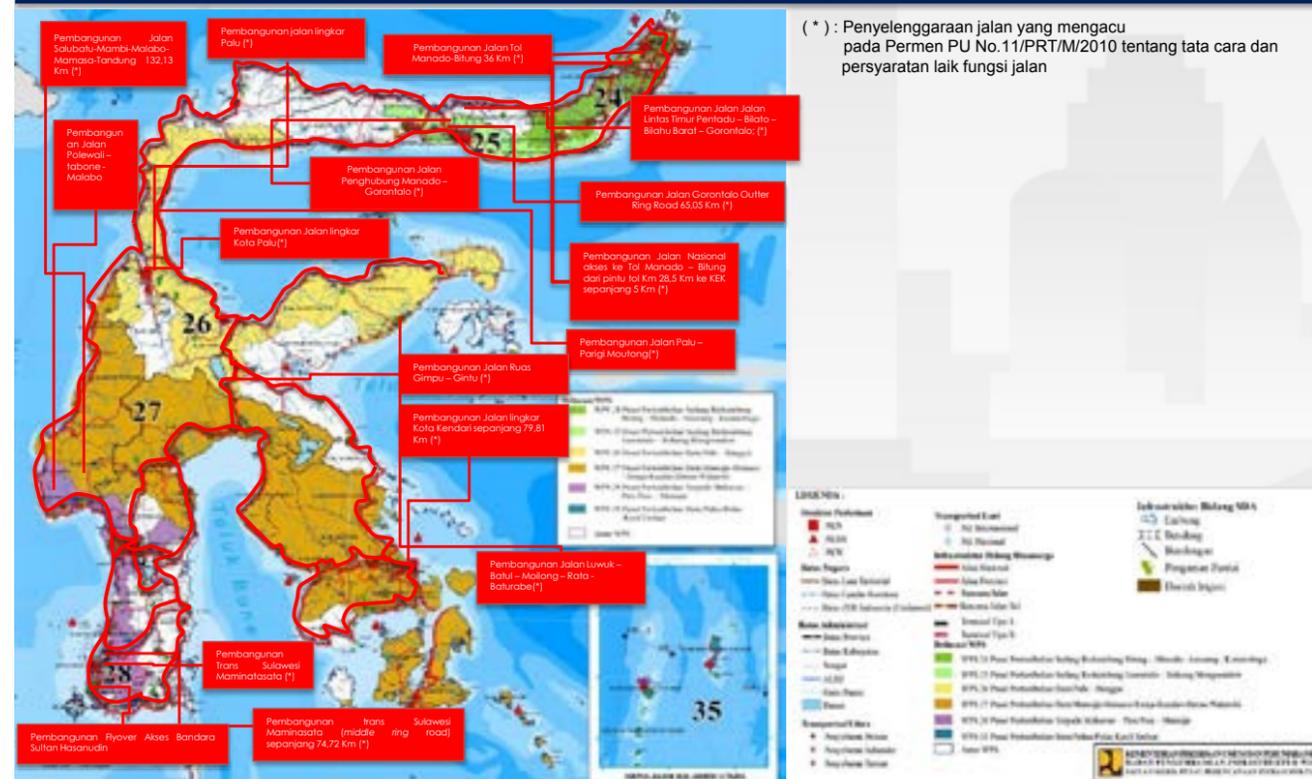
Terkait keterpaduan program utama kawasan Metropolitan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) maka akan dibangun Bypass Mamminasata (program lanjutan), pembangunan Bendungan Karalloe (program lanjutan), dan pembangunan Underpass Simpang Mandai.

MALUKU

Program Utama Kepulauan Maluku Mendukung Keseimbangan Antar Wilayah

Beberapa program mendukung keseim-

PROGRAM UTAMA PULAU SULAWESI MENDUKUNG PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN MENGURANGI DISPARITAS



(*): Penyelenggaraan jalan yang mengacu pada Permen PU No.11/PRT/M/2010 tentang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan

Konsep kawasan perkantoran kota

Sumber: Istimewa

bangunan antar wilayah, seperti pembangunan Jalan Buli Maba, pembangunan Jalan SAGEA – PATANI, penggantian Jembatan Wai Ruhu Baru, dan pembangunan Jalan Trans Maluku Ruas Barat Pulau Seram – Taniwel – Saleman.

Program Utama Kepulauan Maluku Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tahun depan seperti pembangunan Bendung Leleseng, pembangunan Intake Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Dusun Hatu, dan Ambon Water Front City.

Program Utama Kepulauan Maluku Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Untuk program mendukung peningkatan kualitas hidup ini, ada 10 program infrastruktur yang direncanakan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, diantaranya pembangunan TPA Sampah Kota Namrole, pembangunan infrastruktur Kawasan Potensial Agro Mina Pariwisata, dan Penataan Kawasan Strategis Nasional Kec Saparua (program lanjutan). Kemudian dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga ada 10 program

diantaranya pembangunan Rumah Susun Nelayan, pembangunan Rumah Khusus Perbatasan, dan pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana.

Keterpaduan Program Utama KSPN Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara

Terkait keterpaduan program utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

ada 10 program infrastruktur yang direncanakan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, diantaranya pembangunan TPA Sampah Kota Namrole, pembangunan infrastruktur Kawasan Potensial Agro Mina Pariwisata, dan Penataan Kawasan Strategis Nasional Kec Saparua (program lanjutan).

seperti pembangunan Konstruksi Penahan Ombak Panai Morotai Selatan Tahap I, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Kabupaten Morotai, dan pelebaran Jalan Bere Bere Sofi.

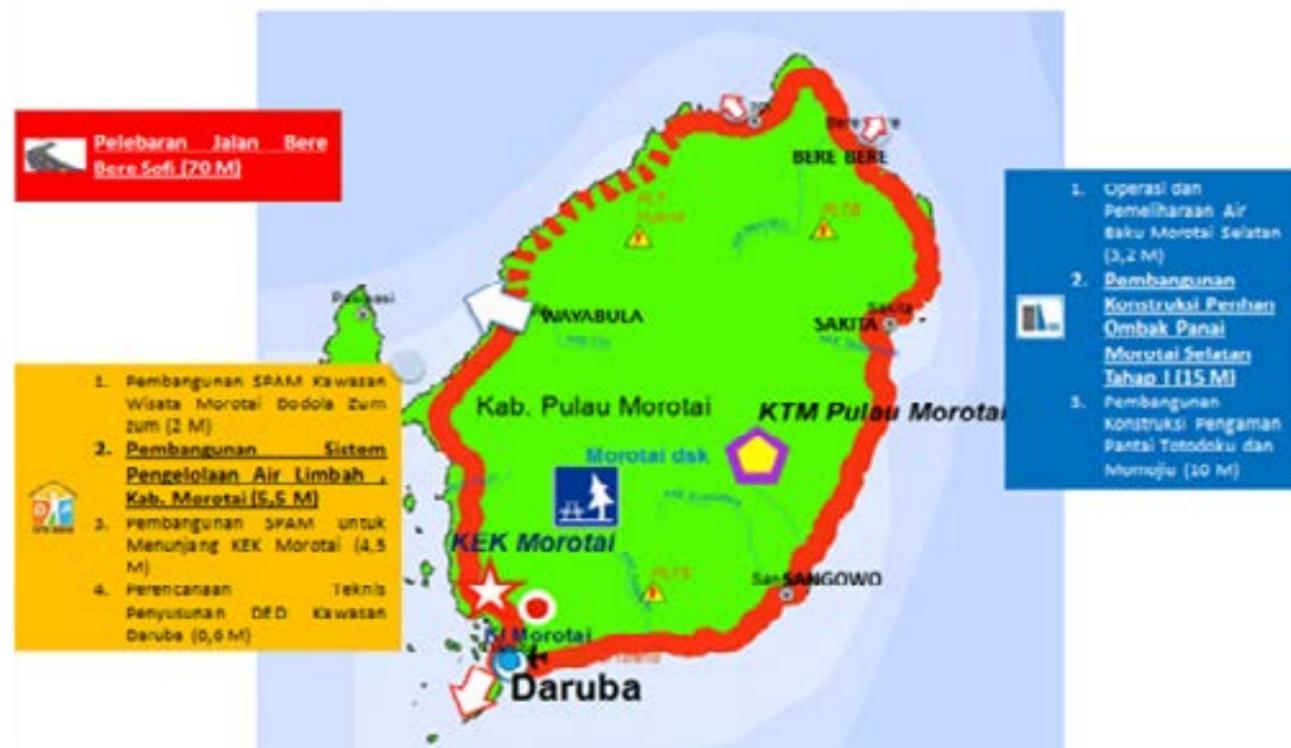
PAPUA

Program Utama Mendukung Peningkatan Keseimbangan Antar Wilayah

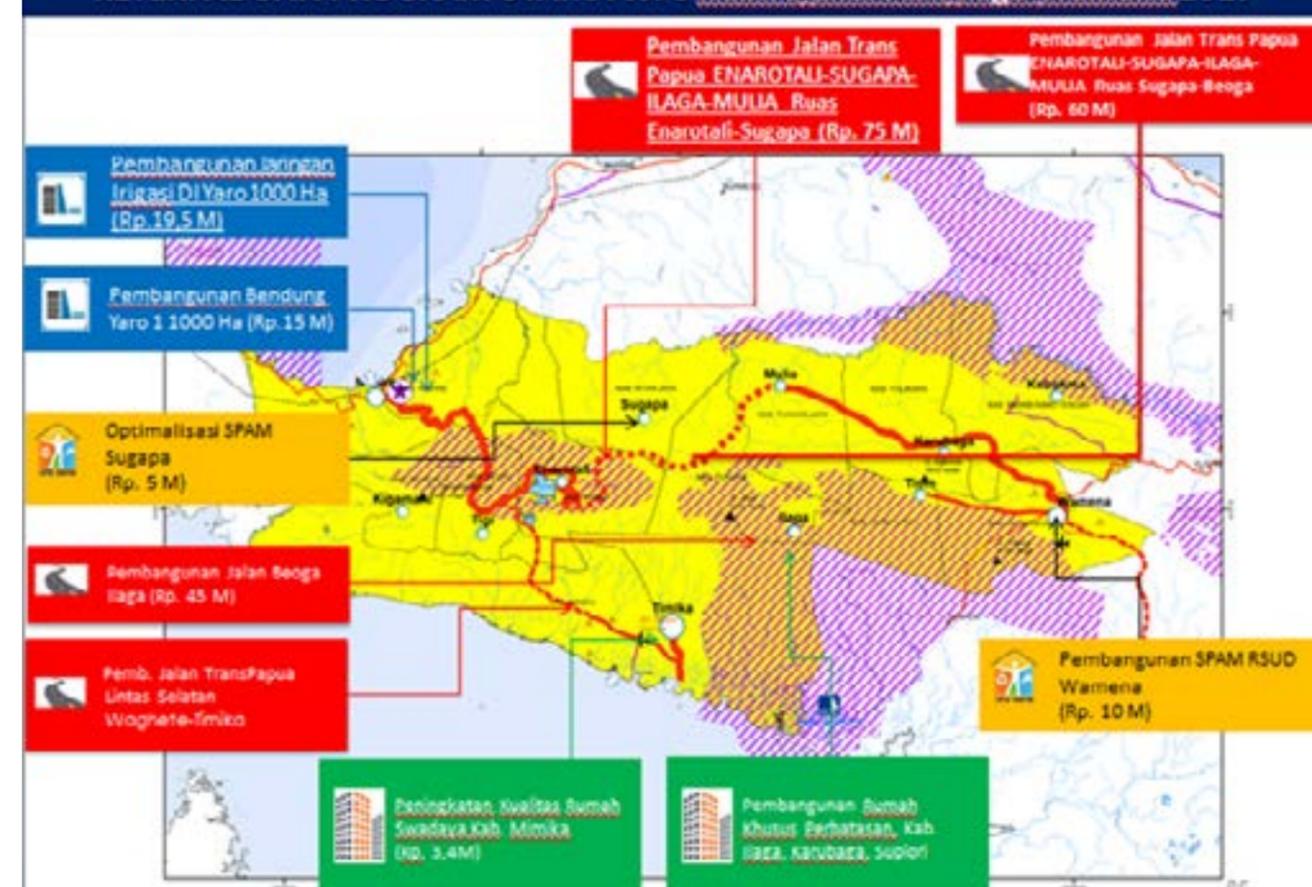
Kementerian PUPR mendukung peningkatan keseimbangan antar wilayah di Kepulauan Papua dengan merencanakan 11 pembangunan infrastruktur, yakni, pertama pelebaran Jalan Abepura. Kedua, pembangunan Jembatan Holtekamp. Ketiga, pembangunan Jalan Ring Road. Keempat, Peningkatan Struktur Jalan Mameh Bintuni I Mameh Bintuni. Program kelima, Rekonstruksi Wanci Topanuanda Jalan masuk bandara.

Kemudian program keenam, Penggantian Jembatan Tahota II Tahap I Mameh Bintuni. Ketujuh, pembangunan Jembatan Mameh. Kedelapan, Rehabilitasi Mayor Jalan Bts Kab Boven Digoel – Merauke Muting. Program kesembilan yakni, Rehabilitasi Mayor Muting Bupul. Kesepuluh, pembangunan Jalan Trans Papua Enarotali-Sugapa-Illaga-Mulia Ruas Enarotali-Sugapa. Kemudian program yang kesebelas adalah pemban-

KETERPADUAN PROGRAM UTAMA KSPN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA 2017



KETERPADUAN PROGRAM UTAMA WPS Nabire-Enarotali-Illaga-Wamena 2017



gunaan Jalan Trans Papua Enarotali-Sugapa-Illaga-Mulia Ruas Sugapa-Beoga.

Program Utama Mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi

Untuk mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi, Kementerian PUPR telah menyiapkan tujuh program pembangunan infrastruktur yang direncanakan tahun depan, yakni Pengamanan Pantai Tanjung Kasuari, pembangunan Sistem Air Baku SPAM Regional Kota dan Kabupaten Sorong, pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Jayapura SA Danau, dan pengendalian banjir sungai Siborgonyi Kota Jayapura. Selanjutnya program peningkatan Saluran Sekunder D.I. Koya, pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Skow di Kota Jayapura, dan pembangunan Daerah Irigasi Rawa Salor.

Program Utama Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup

Beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang mendapat dukungan Kement-

rian PUPR diantaranya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Pasca Bencana Kota Sorong, Revitalisasi Kawasan Kumuh kawasan Bayangkara, Gurabesi, Imbi, Mandala, Tanjung Ria, dan Trikora, serta Penanganan Perbatasan Darat Baru Muting.

Keterpaduan Program Utama WPS Nabire-Enarotali-Illaga-Wamena

Beberapa program pembangunan in-

Untuk mendukung Kedaulatan Pangan, Ketahanan Air, dan Kedaulatan Energi, Kementerian PUPR telah menyiapkan tujuh program pembangunan infrastruktur yang direncanakan tahun depan.

infrastruktur yang direncanakan Kementerian PUPR pada WPS Nabire-Enarotali-Illaga-Wamena yakni pembangunan Jalan Trans Papua Enarotali-Sugapa-Illaga-Mulia Ruas Enarotali-Sugapa, pembangunan Jalan Trans Papua Enarotali-Sugapa-Illaga-Mulia Ruas Sugapa-Beoga, pembangunan Jalan Beoga

Illaga, dan pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Yaro 1000 Ha.

Keterpaduan Program Utama Kawasan Industri Prioritas Teluk Bintuni

Terkait keterpaduan program kawasan industri prioritas Teluk Bintuni beberapa program pembangunan infrastruktur yang direncanakan seperti, peningkatan Struktur Jalan Mameh Bintuni I Mameh Bintuni, pembangunan Rusunawa Pekerja Industri, pembangunan Jembatan Mameh, dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Bintuni Barat.

Keterpaduan Program Utama Kota Baru Jayapura

Untuk keterpaduan program utama Kota Baru Jayapura beberapa program yang disiapkan tahun depan diantaranya pembangunan Jembatan Holtekamp, pembangunan Jalan Ring Road, dan Revitalisasi Kawasan Kumuh kawasan Bayangkara, Gurabesi, Imbi, Mandala, Tanjung Ria, dan Trikora. **Tim Redaksi**



Program PUPR Tahun 2017 Maksimalkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelenggarakan hajatan penting yakni Konsultasi Regional atau Konreg, awal April lalu. Konreg merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan, sebagai salah satu tahapan penyiapan program guna mensinergikan sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang

dimiliki Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Konreg pada tahun ini mengambil tema “meningkatkan keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis wilayah pengembangan strategis menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”.

Sebelum digelar, Konreg terlebih dahulu dilakukan Pra Konreg di empat kota besar yakni Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar, Februari lalu. Seluruh instansi yang berhubungan dengan sektor PUPR baik pusat maupun daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi, merumuskan penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2017. Pada akhirnya penyusunan program infrastruktur PUPR ini menghasilkan banyak program yang memaksimalkan pengembangan wilayah di seluruh Indonesia. Bila semua program direalisasikan pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ditemui Buletin Sinergi, usai pelaksanaan Konreg, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc, menyampaikan beberapa hal yang dihasilkan dalam Konreg tersebut. Berikut kutipan wawancaranya.

Sebelum dilaksanakannya Konsultasi Regional, telah dilakukan Pra Konreg. Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan dari Pra Konreg tersebut?

Sebenarnya, hasil yang diharapkan dari Pra Konreg yakni isu strategis dan rencana kebutuhan pembangunan Bidang PUPR di seluruh provinsi di Indonesia dari diskusi dalam desk provinsi. Hasil lain yang diharapkan yakni rencana pencapaian Rencana Strategis atau Renstra, dan usulan rencana kegiatan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Konreg PUPR 2016, guna penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR tahun 2017 yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar WPS. Pelaksanaan Pra Konreg yang sudah dilakukan di empat tempat mencerminkan kewilayahan berbasis kepulauan. Selain itu sebagai wahana komunikasi antara satminkal pusat di daerah maupun pusat, sekaligus konsolidasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan dibukanya pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka saat ini menjadi era kompetisi. Untuk itu kita harus meningkatkan daya saing, salah satunya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, kita mengarah pada pelaksanaan dari Nawacita, yang bermuara untuk kepentingan masyarakat.

Apa perbedaan Pra Konreg dulu dan sekarang ?

Kalau dulu Pra Konreg masing-masing Ditjen atau sektor memaparkan program masing-masing. Kemudian program masing-masing Ditjen tersebut disesuaikan anggaran yang ada, tapi pendekatan penyesuaian anggaran ini sendiri-sendiri. Kalau sekarang, langkah pertama yang kita lakukan adalah bersama sektor-sektor diluar PUPR menetapkan prioritas-prioritas nasional, karena infrastruktur PUPR merupakan pendukung. Dari koordinasi dengan sektor-sektor lain ini didapat prioritas nasional menyangkut beberapa program seperti Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, Kawasan Industri atau KI, Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional atau KSPN, program kawasan perbatasan, dan program untuk perkotaan termasuk kota baru. Setelah itu dalam Pra Konreg undang sektor-sektor di Kementerian PUPR yakni Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. Dalam koordinasi itu kita bicarakan prioritas

“Pelaksanaan Pra Konreg yang sudah dilakukan di empat tempat mencerminkan kewilayahan berbasis kepulauan. Selain itu sebagai wahana komunikasi antara satminkal pusat di daerah maupun pusat, sekaligus konsolidasi pemerintah pusat dan daerah”.

nasional yang bisa didukung Kementerian PUPR. Kita juga melakukan koordinasi dengan daerah. Jadi yang kita dukung itu yang bisa kita realisasikan. Kemudian kita buat perencanaan terpadu berbasis pengembangan wilayah. Dengan demikian dari sisi program tersinkronisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing sektor.

Setelah koordinasi antar sektor dilakukan, langkah apa lagi yang harus dilakukan ?

Kita juga harus membuat jangka waktu dari suatu program pembangunan infrastruktur. Misalnya pembangunan waduk ditargetkan dibangun selama empat tahun, maka kita harus menjamin itu terlaksana, termasuk menjamin ketersediaan dana. Kemudian membangun jalan tol, ditargetkan selama tiga tahun dengan multiyear. Tapi kalau sifatnya yang dibangun itu misalnya rumah susun, itu bisa dibangun dalam kurun waktu satu sampai dua tahun, dan pendanaannya bisa single year atau satu tahun anggaran. Selanjutnya dari sisi besarnya, dapat ditentukan, misalnya berapa kilometer jalan tol yang akan ditangani dan dari besaran

tersebut, dapat diketahui berapa dana yang dianggarkan. Jadi dari segi fungsi infrastruktur, lokasi, waktu, dan besarnya, kita susun dengan rinci. Jadi bila pemrograman dapat sinkron dalam arti saling komplementer atau saling mengisi satu sama lain. Harmonisasi antar sektor dilakukan dalam beberapa program strategis seperti KEK, di KI, Kota Baru, Metropolitan, dan KSPN.

Apa fokus dari program infrastruktur tahun 2017?

Dalam membuat program infrastruktur tahun 2017, kita fokus bagaimana caranya pembangunan infrastruktur mendapatkan hasil yang lebih besar. Misalnya, kalau kita investasi 20%, hasil yang didapat 70%. Untuk itu, pembangunan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berbasis 35 wilayah pengembangan strategis atau WPS yang didalamnya terdapat wilayah pertumbuhan.

Langkah ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan, mengingat di dalam wilayah pertumbuhan tersebut terdapat beberapa program strategis yang bisa kita dukung, seperti 10 prioritas KSPN, Kawasan Strategis Metropolitan, Kawasan Industri Prioritas, maupun Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Dukungan infrastruktur yang kita berikan, agar sebuah kawasan, seperti kawasan industri bisa berproduksi, artinya memberikan outcome dan impact, seperti membuka lapangan kerja dan peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.

Bisa disebutkan beberapa bentuk dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan infrastruktur sektor lain?

Beberapa dukungan yang kita berikan seperti mendukung pembangunan pelabuhan perikanan di Bitung, Kendari dan di Prigi. Dukungan tersebut kita tuangkan dalam program untuk tahun 2017. Kita juga sepakat mendukung pelabuhan baru di Samarinda. Selain itu kita juga mendukung pembangunan infrastruktur di 10 KSPN, seperti Danau Toba, Wakatobi, Mandalika, Borobudur, dan Tanjung Lesung. Kita juga secara khusus mendukung upaya membangun 40 kawasan perdesaan nasional, dalam program Kota Terpadu Mandiri. Dalam program tersebut terdapat pengembangan agropolitan dan minapolitan.



“Dari total kebutuhan Rp 166 triliun itu, nanti akan dicoba dijadikan menjadi Rp 104 triliun yang berbasis pada Rencana Strategis atau Renstra Kementerian PUPR. Dari nilai tersebut, 34 % tetap menjadi prioritas, dan kita coba untuk dipertahankan agar tidak dipotong”.

Pada pelaksanaan Pra Konreg yang telah dilaksanakan di empat kota pada Februari lalu, didapatkan total anggaran sebesar Rp 166 triliun. Dari total kebutuhan Rp 166 triliun itu, nanti akan dicoba dijadikan menjadi Rp 104 triliun yang berbasis pada Rencana Strategis atau Renstra Kementerian PUPR. Dari nilai tersebut, 34 % tetap menjadi prioritas, dan kita coba untuk dipertahankan agar tidak dipotong.

Apakah semua anggaran dari program infrastruktur yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan atau kemungkinan anggarannya bisa dipotong?

Dengan terbatasnya anggaran, maka beberapa program pembangunan infrastruktur kita pertajam, artinya ada yang kita potong. Cara memotongnya ada dua, yakni vertikal dan horizontal. Untuk pemotongan dengan cara vertikal artinya anggarannya disediakan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Misalnya untuk program yang bersifat multiyear seperti pembangunan waduk. Kalau dilihat dari kepentingannya, bahwa

pembangunan waduk ini merupakan yang utama untuk mencapai kedaulatan pangan, jadi penting untuk dianggarkan, sehingga dipotong vertikal. Jadi dikurangi anggaran dan dianggarkan beberapa tahun. Kemudian kalau kita melihat bahwa suatu program itu tidak terlalu mendukung kawasan pertumbuhan atau pusat pertumbuhan, maka pemotongan secara horizontal artinya kita tunda dulu atau tidak kita anggarkan, sampai terealisasinya anggaran Rp 104 triliun.

Bagaimana dengan daerah sendiri?, apakah mereka mendukung pemotongan seperti ini?

Tentu, karena program 2017 ini kita susun bersama daerah. Pada prinsipnya, anggarannya tersedia dan rasionalisasi atau penyesuaian terhadap anggaran tersebut kita lakukan agar kaidah-kaidah kita dalam menyusun rencana dan program tadi tetap terlaksana, itu yang kita lakukan.

Apakah pendekatan wilayah dalam program pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan sejak dulu?

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dari dulu basisnya pendekatan wilayah, tapi sekarang kita siapkan basis kewilayahan itu dalam sebuah kelembagaan. Artinya masing-masing pihak saling berkoordinasi dan menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya. Misalnya BPIW bertugas sebagai perencanaan sekaligus pemrograman, Sekjen menyiapkan kelembagaan dan administrasinya, dan pelaksanaannya Dirjen-Dirjen. Kemudian yang melakukan kontrol terhadap program pembangunan infrastruktur adalah Irjen. Jadi masing-masing instansi melakukan fungsinya masing-masing. Hal ini untuk mendukung sektor-sektor prioritas nasional dan infrastruktur PUPR tidak bisa membangun sendiri, perlu kerjasama dengan sektor lain sehingga pengembangan wilayah dapat terealisasi.

“Jadi dengan keterpaduan maka akan banyak program pembangunan infrastruktur yang dapat dilaksanakan berbasis pengembangan wilayah. Dengan demikian diharapkan disparitas antar wilayah dapat dihilangkan dan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih meningkat”.

Apakah dengan Konreg ini sudah sangat jelas terlihat keterpaduan antar sektor?

Pada Konreg tahun ini, antar sektor terlihat lebih terpadu dalam menyusun program pembangunan infrastruktur, dan ini kita pertahankan. Memang harus kita koordinasikan apa yang akan dibangun masing-masing pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Dengan dilakukannya koordinasi dan sinkronisasi, maka program pembangunan infrastruktur satu pihak dapat disesuaikan dengan pihak lain. Misalnya Kota Cikarang di Bekasi akan bangun dry port atau pelabuhan daratan tambahan, maka kita berikan akses untuk ke jalan tol. Kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan jalan akses di dalamnya dry port tersebut. Saat ini kita memiliki kanal CBL atau Cikarang Bekasi Laut. Dengan dibangunnya kanal ini akan kita manfaatkan untuk mengangkut peti kemas. Sehingga nanti bisa masuk sampai ke Tanjung Priok.

Jadi dengan keterpaduan maka akan banyak program pembangunan infrastruktur yang dapat dilaksanakan berbasis pengembangan wilayah. Dengan demikian diharapkan disparitas antar wilayah dapat dihilangkan dan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih meningkat.

Apakah pembangunan infrastruktur di daerah, disesuaikan program prioritas nasional?



Salah satu jalan tol di wilayah pertumbuhan

Sumber: Dok.PUPR

Pembangunan infrastruktur suatu daerah harus terpadu. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur disuatu wilayah, harus disesuaikan dengan prioritas nasional. Salah satunya misalnya fokus kita terhadap pembangunan kawasan strategis nasional seperti 10 KSPN antara lain Danau Toba, maka yang harus dilakukan bersama adalah membangun kawasan wisata tersebut, sehingga dapat menarik turis mancanegara untuk datang. Infrastruktur menuju kawasan wisata itu dibangun, termasuk kawasan di dalam destinasi wisata tersebut. Kalau selama ini jalan menuju ke Danau Toba butuh waktu 4-5 jam, misalnya, maka dengan pembangunan jalan tol, dapat mempersingkat waktu tempuh menjadi sekitar 1,5 jam. Sumber daya manusia yang ada dalam kawasan wisata ini juga harus ditingkatkan. Jadi ini harus ada keterpaduan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

“Harapan stakeholders yang harus kita penuhi, yakni meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Selain itu konektivitas bagi penguatan daya saing harus terus ditingkatkan dan layanan infrastruktur dasar juga harus dioptimalkan.”

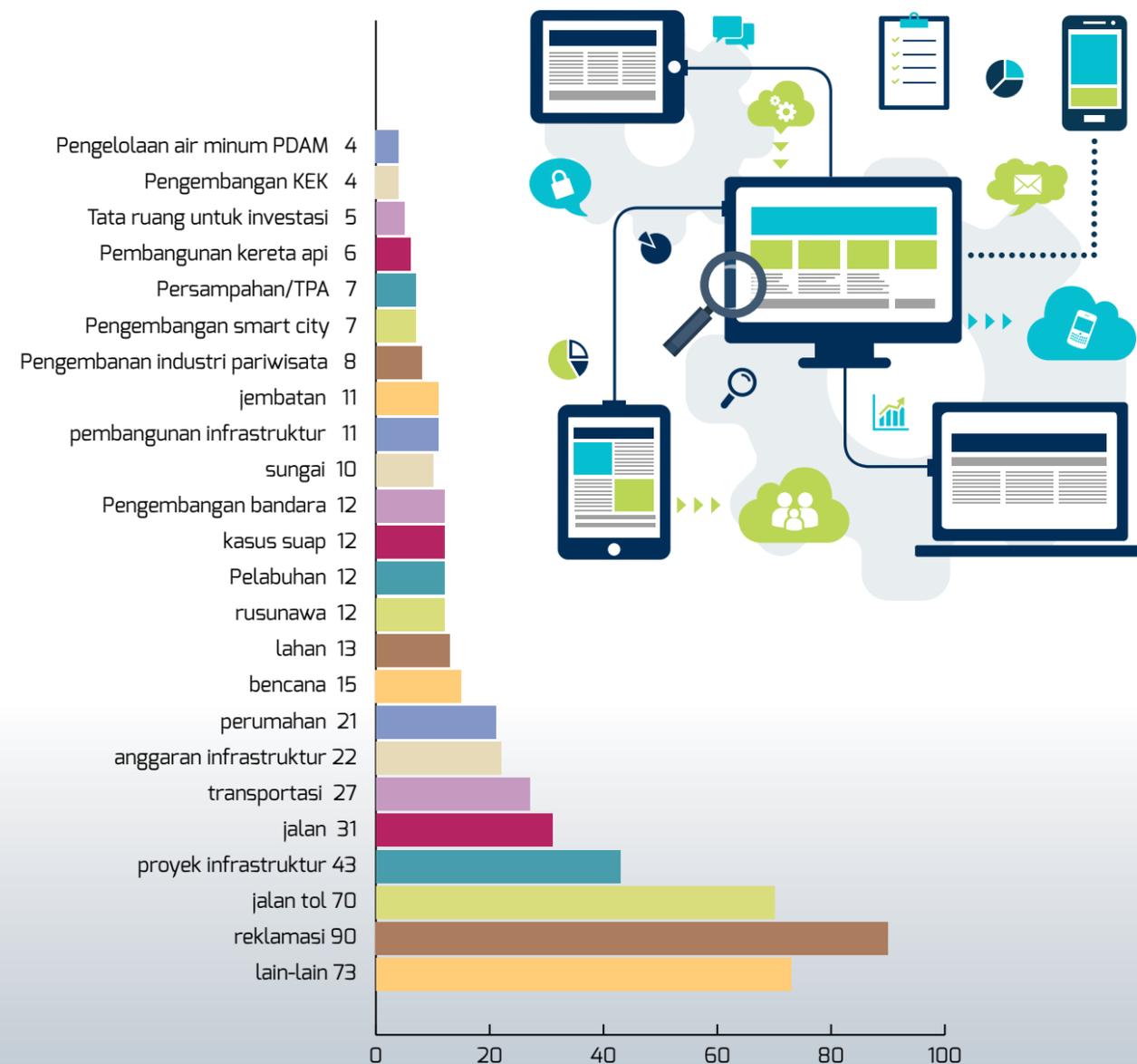
Apa harapan stakeholders yang harus dipenuhi Kementerian PUPR?

Harapan stakeholders yang harus kita penuhi, yakni meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam

mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Selain itu konektivitas bagi penguatan daya saing harus terus ditingkatkan dan layanan infrastruktur dasar juga harus dioptimalkan. Keterpaduan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. **Hendra Djamal**

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran SINDO, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan, selama bulan Maret 2016. Total ada 399 berita dari 7 media koran periode 1 Maret – 31 Maret 2016.



- Koran –Investor Daily (Halaman 4) Jumat, 1 April 2016**
UU Tapera dan Harapan Pekerja
 Betapa menggebu keinginan buruh untuk memiliki rumah. Namun, mayoritas buruh tidak mampu membeli rumah dengan mekanisme apapun.
- Koran Investor Daily (Halaman 6) Jumat, 1 April 2016**
Transaksi Tol Diintegrasikan Mulai Juni
 Pemerintah akan mengintegrasikan pembayaran tarif tol untuk ruas Jakarta- Cikampek-Palimanan, Jakarta-Cikampek-Purbaleunyi dan Palimanan-Kanci-Pejagan-Brebes Timur mulai 13 Juni 2016.
- Koran Republika (Halaman 25) Senin, 4 April 2016**
SDM dan Infrastruktur Jadi Kunci
 Pendekatan Growth Diagnostic menunjukkan dua persoalan menjadi kendala utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia; SDM dan infrastruktur terkait konektivitas dan logistik.
- Koran – Kompas (Halaman 17) Selasa, 05 April 2016**
Konektivitas Terus Dibangun
 Pembangunan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, membuktikan komitmen pemerintah memacu pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.
- Koran – Kompas (Halaman 1) Rabu, 06 April 2016**
Infrastruktur: Keterhubungan Antardaerah Dibangun
 Presiden Jokowi bertekad membangun konektivitas atau keterhubungan antardaerah dari Sabang hingga Wasior, Papua Barat.
- Kompas (Halaman 6) Kamis, 7 April 2016**
Infrastruktur Kawasan timur
 Peresmian sejumlah proyek infrastruktur bagian timur Indonesia oleh presiden Joko Widodo menandai semakin terbukanya kawasan itu.
- Media Indonesia (Halaman 18) Rabu, 13 April 2016**
Percepat Program 1 juta rumah izin pembangunan dipangkas
 Pemerintah akan mengakselerasi program pembangunan 1 juta rumah dengan memangkas perizinan dan melakukan standarisasi biaya.
- Koran Media Indonesia (Halaman 1) Kamis, 28 April 2016**
Pembangunan Tol Trans- Sumatera
 Foto udara proyek Tol Trans-Sumatra (JTT5) Lampung Ruas Sabah, Lampung Selatan, Lampung, kemarin, Pembangunan tol yang ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2016 itu masih terkendala pembebasan lahan sepanjang 3,3 km di Kilometer 72 dan 80.
- Koran Tempo (halaman 2) Selasa, 26 April 2016**
Persiapan Mudik, Pembayaran tol disatukan
 Kementerian PUPR menyatukan pembayaran jalan tol mulai di pintu Cikarang Utara hingga Brebes Timur. Integrasi pembayaran ini terbagi menjadi dua cluster. Pertama dimulai di tol Jakarta-Cikampek hingga Cikopo-Palimanan dan cluster kedua dari Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan hingga Pejagan Brebes Timur.
- Investor Daily (Halaman 22) Jumat, 22 April 2016**
Kementerian PUPR bentuk Tim pendataan sejuta rumah
 Tim tersebut diharapkan dapat menghimpun data-data pembangunan rumah untuk masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat.

Lima Strategi Membangun Infrastruktur di Papua



Kepala BPIW menjelaskan lima strategi PUPR dalam Membangun Infrastruktur Papua

Sumber: Dok. BPIW

Nawacita pemerintahan saat ini mengamanatkan pembangunan dari pinggiran dan daerah perbatasan, terutama di kawasan timur Indonesia. Terkait kawasan tersebut, salah satu yang diprogramkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), adalah pembangunan Infrastruktur di Pulau Papua. Untuk itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hermanto Dardak menyatakan ada 5 strategi pembangunan infrastruktur yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pulau tersebut.

Hal itu disampaikan Dardak, Senin (25/4) saat rapat persiapan kunjungan Presiden ke Papua minggu ini terkait Reorientasi Pembangunan Papua. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan beberapa satminkal di lingkungan Kementerian PUPR di Ruang Rapat

BPIW ini, Dardak menjelaskan 5 strategi tersebut, pertama peningkatan konektivitas di 4 wilayah pertumbuhan (WPS) untuk membangun potensi ekonomi termasuk di wilayah perbatasan untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah. Keempat WPS tersebut yakni WPS Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena, dan WPS Jayapura – Merauke.

Strategi kedua, pengembangan wilayah melalui pembangunan Trans Papua yang menghubungkan antar wilayah pertumbuhan strategis. Ketiga, pengembangan konektivitas menuju kawasan-kawasan prioritas di luar WPS. Strategi keempat menurut Dardak adalah pemanfaatan sumber daya dengan membangun kawasan pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan maupun kedaulatan energi yang membutuhkan

dukungan infrastruktur sumber daya air. Kelima, Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman yang membutuhkan infrastruktur dasar baik infrastruktur permukiman maupun perumahan termasuk mendukung pengembangan pusat permukiman baru.

“Dalam WPS terdapat kawasan-kawasan pertumbuhan yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan antar pusat pertumbuhan maupun infrastruktur akses menuju outlet-outlet pemasaran. Hal ini sekaligus membentuk sistem transportasi antar moda baik di darat, laut maupun sungai,” terang Dardak.

Dikatakannya, dalam peningkatan konektivitas di kawasan tersebut, saat ini sedang dibangun Jalan Trans Papua yang dibagi menjadi empat, yaitu Jalan Trans Papua ruas Sorong – Manokwari, Jalan Trans Papua



Pembangunan Jalan Oksibil - Dekai, Papua

Sumber: Dok. BPIW

ruas Manokwari – Mameh, Jalan Trans Papua ruas Nabire – Wamena dan Jalan Trans Papua ruas Jayapura – Merauke.

Sedangkan dalam mendukung pertahanan keamanan dan penanganan wilayah perbatasan, saat ini Kementerian PUPR sedang berupaya untuk menata Kawasan Perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar. Terkait konektivitas di perbatasan, saat ini pembangunan jalan dari Ubrub menuju Oksibil sepanjang 300 km masih mengalami hambatan berupa kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan.

Dalam strategis pemanfaatan sumber daya dengan membangun kawasan pertanian, Dardak menjelaskan bahwa Kawasan Merauke maupun Nabire merupakan kawasan yang

memiliki potensi pertanian seluas 12.000 Ha sehingga perlu dikembangkan melalui dukungan infrastruktur sumber daya air. Potensi lahan pertanian. “Sedangkan untuk

Saat ini Kementerian PUPR sedang berupaya untuk menata Kawasan Perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar.

mendukung agribisnis, diperlukan dukungan infrastruktur jalan mendukung Merauke Industrial Food and Energy Estate atau

MIFEE,” lanjut Dardak.

Terkait dengan strategi peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, saat ini menurut Dardak, sudah diprogramkan pembangunan rusunawa bagi pekerja industri di Bintuni, peningkatan kualitas rumah swadaya pasca bencana di Kota Sorong dan Jayapura, peningkatan kualitas permukiman kumuh di beberapa kawasan, peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Jayapura dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional perkotaan. **(INI/InfoBPIW).**

Infrastruktur di Perbatasan Dibangun Melalui Program WPS



Kepala BPIW dan jajaran berinteraksi dengan petani lokal saat panen di Papua.

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Penanganan infrastruktur yang merupakan amanah dari Nawacita ini, dilakukan dengan pendekatan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Penanganan wilayah perbatasan tersebut untuk mendukung pertahanan

keamanan dan pengembangan wilayah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat berbicara pada Forum Koordinasi Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Merauke, Rabu (27/4).

Lebih lanjut Dardak menjelaskan kawasan perbatasan di Papua tercakup dalam WPS

34 yakni Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke, sepanjang 1.105 km.

"Pengembangan kawasan perbatasan akan mendukung pertahanan dan untuk keamanan dan sekaligus untuk pengembangan wilayah, dengan mempertimbangkan satu hal, bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Dardak. Penataan kawasan perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan

PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar.

Selain WPS Jayapura-Merauke, wilayah pengembangan baru di Papua seperti WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, dan WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena. Pembagian WPS tersebut menurut Dardak sejalan dengan

WPS antar WPS. Skenario ketiga, dengan penanganan jalan Trans Papua di dalam WPS dan Antar WPS, serta jalan nasional non Trans Papua.

Menurut Dardak total jalan Trans Papua mencapai 4.325 km yang terdiri dari jalan nasional mencapai 2.685 km dan jalan non nasional mencapai 1.640 km. Kemudian jalan

belum tembus dikarenakan kondisi geografis yang berupa pegunungan," ulas Dardak.

Dengan berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Papua, Dardak meyakini pertumbuhan ekonomi pulau tersebut akan meningkat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Kondisi salah satu irigasi di Papua.

Sumber: Dok. BPIW

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019, dimana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pengembangan wilayah. "Jadi kita fokus untuk mengidentifikasi wilayah yang punya daya dukung dan daya tampung untuk investasi. Berbagai kawasan prioritas nasional terfokus disitu, kita koneksikan dan kembangkan," ungkap Dardak.

Terkait penanganan ruas jalan di Pulau Papua menurut Dardak dilakukan melalui tiga skenario.

Skenario pertama, penanganan jalan Trans Papua didalam WPS. Skenario kedua, penanganan jalan Trans Papua di dalam

yang sudah tersambung mencapai 3.625 km dan yang belum tersambung 700,2 km.

Dardak menjelaskan kawasan perbatasan di Papua tercakup dalam WPS 34 yakni Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke, sepanjang 1.105 km.

"Adapun sepanjang 300 km terutama dari Ubrub ke Oksibil yang bukan merupakan bagian dari Trans Papua yang pada saat ini

Acara yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dihadiri oleh beberapa kalangan seperti Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si, dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Mardi Santoso, dan beberapa asosiasi dari dunia usaha.

Disela-sela kegiatan Dardak beserta rombongan dari BPIW melakukan tinjauan lapangan ke proyek pembangunan irigasi di Merauke.

Hen/infobpiw

Provinsi Banten Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan potensi wilayah pada tahun 2017. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten. Pembangunan infrastruktur tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten, Kamis (7/4).

Musrenbang tahun ini mengambil tema "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan



Kepala BPIW, Hermanto Dardak menjadi salah satu pembicara dalam diskusi pembangunan di Musrenbang Banten

Sumber: Dok. BPIW

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah".

Rano mengatakan salah satu prioritas pembangunan di Banten adalah peningkatan konektivitas dan dukungan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian yang merata di setiap wilayah. "Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur adalah yang utama dilakukan di Banten," tegas Rano.

Saat berbicara mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan jalan tol akan menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dijelaskannya, saat ini



Foto bersama pembicara diskusi pembangunan Musrenbang Banten

Sumber: Dok BPIW

sedang dibangun proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Banten seperti jalan tol Serang – Panimbang sepanjang 83,6 km, Kunciran – Serpong sepanjang 11,19 km, Serpong – Cinere sepanjang 10,14 km dan Serpong – Balaraja sepanjang 30 km. "Dari pintu tol Merak menuju pintu penyebaran saat ini sudah dilebarkan menjadi 4 lajur yang dimaksudkan untuk menjaga daya saing wilayah," ungkap Dardak.

Selain jalan tol, salah satu prioritas infrastruktur yang dibangun di Provinsi Banten adalah bendungan, yaitu Bendungan Karian dan Bendungan Sindang Heula. Dengan dibangunnya kedua bendungan itu diharapkan akan dapat mengatasi masalah banjir.

Dardak juga menyampaikan bahwa infrastruktur dibangun agar terjadi kondisi yang harmoni dengan wilayah pertumbuhan agar dapat memberikan outcome dan impact yang optimal.

"Di Provinsi Banten sudah ditetapkan, Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK yang juga menjadi salah

satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Kementerian PUPR akan mendukung dari segi infrastruktur, sehingga harapannya Tanjung Lesung akan menjadi salah satu kawasan wisata yang dapat menjadi salah satu The New Bali," tutur Dardak.

Selain jalan tol, salah satu prioritas infrastruktur yang dibangun di Provinsi Banten adalah bendungan, yaitu Bendungan Karian dan Bendungan Sindang Heula. Dengan dibangunnya kedua bendungan itu diharapkan akan dapat mengatasi masalah banjir.

Disamping membangun Jakarta sebagai pusat pertumbuhan, menurut Dardak, Kota Tangerang saat ini dibangun untuk menjadi Kota Satelit Mandiri. Sementara Kota Maja sedang dibangun untuk menjadi Kota Publik yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan

baru untuk mendukung pembangunan di provinsi tersebut. "Dalam pembangunan infrastruktur di Banten membutuhkan sinergitas antara pusat dengan pemerintah daerah," tutur Dardak.

Terkait sinkronisasi program, Bambang Priyambodo dari Bappenas menyampaikan

bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah daerah, harus berperan untuk dapat menjadi fasilitator, dalam mempertajam usulan kabupaten dan kota kepada pemerintah pusat. Sehingga ke depan, pada pelaksanaan Musrenbang dapat disampaikan prioritas pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah kabupaten maupun kota.

Kegiatan ini dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bupati Pandeglang, Bupati Tangerang Selatan, Bupati Lebak, Bupati Serang, beserta jajarannya. **(INI/InfoBPIW)**

Jelang Asian Games, Akan Dibangun Rumah Susun Dengan Konsep Superblok di Jakarta



Kepala BPIW, Hermanto Dardak menjadi pembicara di diskusi Musrenbang DKI Jakarta

Sumber: Dok BPIW

Menjelang pelaksanaan Asian Games yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang tahun 2018 mendatang, pemerintah melakukan berbagai persiapan. Untuk pelaksanaan Asian Games di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melakukan penataan dan renovasi 14 bangunan venue di Kawasan Komplek Gelora Bung Karno (GBK). Selain itu Kementerian PUPR juga akan menyiapkan pembangunan rumah susun atau rusun untuk masyarakat yang berpendapatan rendah (MBR). Direncanakan rusun yang akan dibangun itu mencapai 18 hingga 32 tingkat. Kawasan rusun tersebut juga ditata dengan untuk menyambut perhelatan akbar tersebut.

Saat berbicara didepan Sidang Kelompok Bidang Prasarana Sarana Kota Dan Lingkungan Hidup Musrenbang DKI Jakarta, Jumat (15/4) lalu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menjelaskan rumah susun ini akan menggunakan konsep superblok, dimana terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH), akses yang mudah untuk angkutan umum dengan

penataan ulang jaringan jalan, dan trotoar yang dilebarkan untuk pejalan kaki.

Dengan pelebaran jalan tol ini diharapkan dapat mendukung akses untuk angkutan umum disekitarnya. Pelebaran trotoar tersebut juga dapat menjadi upaya DKI Jakarta untuk memenuhi 20% RTH di DKI,

Kegiatan ini merupakan wadah dalam penyusunan RKPD melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur tahun 2013 - 2017.

sehingga beberapa jaringan RTH diperankan oleh trotoar. "Jalan trotoar menjadi salah satu infrastruktur yang penting untuk seluruh Jakarta. Secara teknis, PUPR akan memberikan pedoman secara nasional dan perlu diperhatikan penggunaan warna dan tingkat kekesatan trotoar yang dapat membuat nyaman bagi pejalan kaki," tutur Dardak.

Terkait dengan jalan nasional dan jalan lingkaran luar, menurut Dardak, PUPR saat ini sedang membangun lingkaran luar dan membebaskan lahan terutama untuk tol lingkaran luar tersebut yang mencakup Jalan

Akses Tanjung Priok, Jalan Tol Cengkareng – Kunciran, Jalan Tol Depok – Antasari, Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu dan Jalan Tol Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper. "Pembangunan jalan tol lingkaran luar ini diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan jalan tol lingkaran luar," jelas Dardak.

Disamping itu menurutnya PUPR telah mempertimbangkan enam ruas jalan tol dalam kota kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan jalan nasional di Jakarta, yaitu Jalan Tol Semanan – Sunter, Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang, Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu, Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu, Jalan Tol Ulu-Jami – Tanah Abang dan Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca. "Gubernur DKI Jakarta sudah setuju dengan enam ruas jalan tersebut dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPTJ pun juga sudah ditandatangani," lanjut Dardak.

Pembangunan infrastruktur, menurut Dardak juga diikuti dengan teknologi mutakhir dan di dukung juga estetika pembangunan infrastruktur. "Idealnya pembangunan sudah menggunakan Intelligent Transportation System yang komprehensif baik untuk tol maupun non tol untuk menambah kapasitas," tutur Dardak lagi.

Dalam paparannya itu Dardak juga menerangkan bahwa PUPR saat ini membangun infrastruktur jalan, juga dilengkapi dengan box utilitas. Seperti contoh, Jembatan Suramadu, dimana terdapat box utilitas di bawah jalur sepeda motor. Saat ini, PUPR akan membangun Jalan Tol Bakauheni menuju Palembang dengan membebaskan 120 meter, sebelah kanan untuk jalur kereta api, sebelah kiri jalan di bawahnya dibangun box utilitas yang didalamnya terdapat jaringan listrik, kabel fiber optic, pipa gas dan saluran air. "Saya rasa jaringan utilitas perlu dirancang terutama di jalan-jalan utama di Jakarta. PUPR bisa mendukung dengan disain utilitas," jelas Dardak.

Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan selama tiga hari yaitu dari tanggal 12-15 April 2016. Kegiatan ini merupakan wadah dalam penyusunan RKPD melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur tahun 2013 hingga 2017. Hal ini sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen Rancangan RKPD tahun 2017. Seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta berperan aktif dalam proses Musrenbang tersebut. **(INI/InfoBPIW)**

BPIW Gelar FGD Manajemen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dipilih menjadi salah satu koordinator Penajaman Rencana Aksi dalam mendukung Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk mendukung hal tersebut, BPIW menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di Bogor, Kamis (28/4)

Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menjelaskan Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggara pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

"Dapat dikatakan bahwa BPIW sendiri dibentuk oleh sebuah proses reformasi birokrasi sehingga ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, ini berarti BPIW sebenarnya sedang menjalankan proses reformasi birokrasi," ujar Dadang.

Diakui bahwa BPIW belum sempurna dalam menjalankan Reformasi Birokrasi. Namun Dadang menegaskan BPIW terus berusaha dalam menjalankan Reformasi Birokrasi sesuai dengan aturan yang ada. "BPIW mengemban amanah utama untuk menterpadukan infrastruktur bidang PUPR dan mensinkronkan program pembangunan di Kementerian PUPR," tutur Dadang lagi.

Lebih lanjut Dadang menyatakan area perubahan road map reformasi birokrasi pada 2015-2019 terdiri dari delapan unsur, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia/aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mental aparatur. Menurut Dadang, pembaruan unit organisasi BPIW dilakukan melalui tiga aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), proses kerja, dan output atau hasil kerja. Dari aspek SDM, meski BPIW memiliki keterbatasan SDM, namun setiap SDM harus bisa bekerja secara multitasking atau memiliki konsep yang jelas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Kemudian dari aspek proses kerja, dikatakannya bahwa proses kerja BPIW mendukung Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan penganggaran Sistem

Manajemen Mutu (SMM). Dengan SMM semua pihak di BPIW berkomitmen dalam mencapai sasaran mutu yang telah disepakati bersama dengan tujuan akhir kepuasan stakeholder atas proses kerja BPIW.

"Dapat dikatakan bahwa BPIW sendiri dibentuk oleh sebuah proses reformasi birokrasi sehingga ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, ini berarti BPIW sebenarnya sedang menjalankan proses reformasi birokrasi." ujar Dadang.

Dari sisi aspek output, menurut Dardak, hasil capaian BPIW seperti pengembangan Masterplan yang disusun hingga tahun 2025, menterpadukan lima aspek penting yaitu Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Acara yang diikuti Pejabat Eselon III dan IV BPIW ini, turut menghadirkan narasumber yakni Nurhaya Sakti selaku Pakar Bidang Reformasi Birokrasi. Dalam presentasinya, Nurhaya memaparkan mengenai definisi manajemen perubahan. Menurutnya manajemen perubahan adalah proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu kinerja yang lebih baik dan mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Ia juga menjelaskan mengenai peran penting manajemen perubahan, dimana perubahan dilakukan secara bertahap, mulai dari kondisi yang ada saat ini kemudian diubah menjadi kondisi yang lebih baik di masa datang, melalui Reformasi Birokrasi. **(Adn/infobpiw)**



Dadang Rukmana, Sekretaris BPIW menyampaikan materi RB dalam sambutannya.

Sumber: Dok BPIW

(RPJMN), Direktif sektor, Direktif Presiden, serta kecenderungan investasi swasta. "BPIW secara faktual sudah mendukung Reformasi Birokrasi, namun hal ini tentu saja harus didukung dengan bukti-bukti implementasi yang jelas," tukas Dadang.

Kementerian PUPR Fokus Membangun Kawasan Perbatasan



Kepala BPIW, Hermanto Dardak menyampaikan paparan di Musrenbang Kalimantan Barat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan pada pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Kota Sarawak, Malaysia. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat berbicara mewakili Menteri PUPR, pada pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Barat, di Pontianak, Kamis (14/4).

Dardak menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur di provinsi

ini seperti ASEAN Highway, penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut tahun tahun 2017. Selain itu pembangunan bandar udara, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

"Kalimantan Barat merupakan salah satu ujung tombak perbatasan dengan negara lain. Kawasan perbatasan akan menjadi salah satu pusat fokus pembangunan,

seperti pelebaran dan rekonstruksi jalan ruas perbatasan Entikong, serta renovasi gerbang pintu masuk perbatasan di daerah Entikong itu," tutur Dardak.

Menurut Dardak, sesuai dengan Nawacita, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus fokus pada konektivitas, sehingga dapat memaksimalkan sumber daya di daerah. Oleh karena itu, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur yang handal dan sinkron dengan berbagai stakeholders, dengan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Terkait dengan perbatasan, Dardak juga

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Sambutan Sekaligus Membuka Acara Musrenbang Kalimantan Barat

Sumber: Dok BPIW

mengatakan direncanakan jalan perbatasan akan dibagi menjadi tiga lintas, yaitu lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan. Ketiga lintas tersebut juga akan menjadi lintas regional, dimana untuk Kalimantan Barat, pekerjaan jalan paralel akan diteruskan hingga menembus Temajuk menuju Nanga Era (batas Kalimantan Timur). Penanganan akses perbatasan juga dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau.

"Untuk meningkatkan akses dan image, PUPR akan membuat perspektif perencanaan akses menuju Aruk menjadi empat lajur, begitu juga ke Entikong dan perbatasan. Oleh karena itu, perlu dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian tanahnya. Harapannya, dengan selesainya jalan tersebut, daya saing daerah ini dapat meningkat secara signifikan," ucap Dardak.

Dikatakannya bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk memaksimalkan adanya ASEAN Community dalam upaya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Kalimantan Barat juga diharapkan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, pada

era MEA sekarang ini, terdapat kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standar ASEAN yang didalamnya mencakup Jalan Trans Kalimantan.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk memaksimalkan adanya ASEAN Community dalam upaya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Kalimantan Barat juga diharapkan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hampir seluruh prioritas di daerah saat ini, adalah pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut Tjahjo menyatakan dalam pembangunan infrastruktur harus ada konektivitas dan sinergitas yang baik

dalam pembangunan antar wilayah, antar daerah, antar provinsi dan antar perkotaan, serta perdesaan. "Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing tiap-tiap daerah," imbuh Tjahjo.

Terkait pelaksanaan Musrenbang, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelius mengatakan kegiatan tersebut mempunyai fungsi yang penting dan strategis untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara pelaku pembangunan yang ada di daerah maupun di pusat. "Program pembangunan infrastruktur harus mendukung kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kawasan perbatasan, industri, pariwisata dan sumber daya alam, serta lingkungan hidup," tegas Cornelius.

Pada Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 tersebut mengambil tema "Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Hilirisasi Industri". Kegiatan itu dihadiri beberapa pejabat seperti Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPD RI, Ketua DPRD se-Provinsi Kalimantan Barat, 12 Bupati dan Walikota, perwakilan Bappenas, dan Kementerian Keuangan. **(INI/InfoBPIW)**

Melalui Pra Konreg, Program Utama Pembangunan Infrastruktur Kalimantan Selatan Tahun 2017, Telah Disusun



Bupati Kalsel membnympaiki Materi sekaligus Membuka Acara Musrenbang Kalsel

Sumber: Dok BPIW

Dalam rangka menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Menuju Kalsel Mandiri, Terdepan dan Berkelanjutan di Banjarbaru, Senin (11/4). Kegiatan ini juga untuk memantapkan isu-isu strategis pembangunan daerah termasuk yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan nasional.

Saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada acara tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rezeki Peranginangin memaparkan mengenai rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017, khususnya untuk provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut Rezeki menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pendekatan WPS ini dioptimalkan pembangunan yang memadukan antara

pengembangan wilayah dengan pendekatan market driven, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan.

"Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian PUPR 2015-2019, pembangunan infrastruktur harus meningkatkan keterpaduan, meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, meningkatkan konektivitas dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan," jelas Rezeki pada saat sesi dialog.



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Musrenbang Kalsel

Sumber: Dok BPIW

Rezeki juga menyatakan konsentrasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan saat ini menggunakan backbone Palangkaraya – Banjarmasin – Batu Licin. Dikatakannya bahwa setelah Pra Konsultasi Regional yang diselenggarakan BPIW beberapa waktu lalu, maka sudah tersusun rencana program utama Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Dari sektor Sumber Daya Air (SDA), pembangunan untuk pencegahan banjir di Banjarmasin seperti pembangunan Bendungan Tapin dan pembangunan intake Tirawan Tahap II Kotabaru.

Dari sektor Bina Marga, akan dibangun akses menuju Pelabuhan Trisakti dan beberapa pelebaran jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dari sektor Cipta Karya, terdapat pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gunung Tinggi di Batulicin dan pembangunan kualitas permukiman kumuh di Banjarmasin Utara dan Selatan.

"PUPR juga mendukung dari segi infrastruktur terhadap Kawasan Industri (KI) prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Jorong dan Batulicin, serta dukungan infrastruktur terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pembangunan jaringan irigasi di Batang

Alai Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Pembangunan jaringan irigasi di Amandit dan pembangunan Bendungan Tapin," tutur Rezeki.

Dalam akhir paparan, Rezeki

PUPR mendukung segi infrastruktur terhadap Kawasan Industri (KI) prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Jorong dan Batulicin, serta dukungan infrastruktur terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pembangunan jaringan irigasi di Batang Alai Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Pembangunan jaringan irigasi di Amandit dan pembangunan Bendungan Tapin

menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat saling mendukung untuk kelancaran pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, serta perlu adanya dukungan pembangunan infrastruktur daerah yang sudah

disinkronkan dengan program Kementerian PUPR termasuk dukungan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Saat membuka acara tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menekankan sinergitas yang optimal dan kerjasama yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Senada dengan Sahbirin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Noormiliyani menuturkan bahwa dukungan infrastruktur perlu ditingkatkan dalam mengembangkan potensi pariwisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian, serta perlu adanya sinergitas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.

Hadir dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yakni Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, Bupati dan Walikota se Provinsi Kalimantan Selatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata.

Setelah acara Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung, Tim Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW mengadakan tinjauan langsung ke Kawasan Industri (KI) Batulicin, Kalimantan Selatan dalam rangka tindak lanjut dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan industri tersebut. **(INI/InfoBPIW)**

Jalan di Pulau Sulawesi Bagian Dari Asean Highways

Pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi merupakan bagian dari ASEAN *Highways* atau jaringan jalan beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sudah menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk mendukung pembangunan ASEAN *Highways* tersebut.



Suasana seminar Pemantapan dan Penguatan Program Prioritas Regional Sulawesi

Sumber: Dok. BPIW

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak pada kegiatan Pemantapan dan Penguatan Program Prioritas Kebersamaan Regional Sulawesi yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) di Jakarta, Jumat (15/4).

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi se-Sulawesi, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian

Sulawesi menjadi kawasan strategis yang dilewati oleh *Belt and Road Initiative*, yang merupakan prinsip, kerangka, dan prioritas kerja sama yang mencakup di jalur Sutra yakni melalui Asia Tengah, Asia



Pembangunan Jalan Tol Bitung - Manado

Sumber: Dok. BPIW

Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Program ini dikembangkan negara Cina. Menurut Dardak dengan adanya program tersebut dapat memberikan peluang yang besar bagi Provinsi Sulawesi dalam meningkatkan daya saingnya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Selain itu, Dardak menjelaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Sulawesi seperti penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut tahun 2017. Dukungan juga diberikan Kementerian PUPR terhadap pembangunan bandar udara, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

"Pemerintah saat ini sedang mengoptimalkan peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan ekspres atau jalan tol. Salah satunya jalan tol Manado - Bitung yang berada di Sulawesi Utara.

Pembangunan tersebut perlu dukungan berbagai pihak agar terjadi konektivitas antar wilayah di seluruh wilayah di Sulawesi," tutur Dardak.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung tol laut di Indonesia, khususnya

Sulawesi menjadi kawasan strategis yang dilewati oleh Belt and Road Initiative, yang merupakan prinsip, kerangka, dan prioritas kerja sama yang mencakup di jalur Sutra

Sulawesi menggunakan konsep *ships follow the trade* yang berarti bahwa transportasi mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktifitas perdagangan masyarakat sekitarnya. Dengan begitu perkembangan suatu daerah tergantung pada perkembangan aktivitas atau kegiatan

perdagangan, bisnis dari suatu negara atau masyarakat di wilayah tersebut.

Pembangunan saat ini, menurut Dardak membentuk pusat wilayah dari berbagai wilayah disekitarnya, atau disebut juga dengan polisentris. Sebagai contoh Kota Parepare di Sulawesi Selatan akan dikembangkan dan dihubungkan dengan jalur kereta api. "PUPR akan mendukung dari segi infrastruktur berupa jalan nasional di sekitar jalur kereta api itu," tukas Dardak.

(INI/InfoBPIW)

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu Melalui WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin



Kondisi Pelabuhan Batulicin

Sumber: Dok. BPIW

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu Kabupaten yang akan didukung oleh Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastrukturnya. Hal tersebut mengacu pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), tepatnya WPS 22, yakni Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin. Adanya WPS tersebut menunjukkan bahwa Batulicin yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, agar rencana pengembangan itu dapat lebih optimal, Dardak berharap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat mengembangkan daerahnya sebagai kawasan pertumbuhan yang memiliki prospek yang baik.

Demikian disampaikan Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, saat menerima kunjungan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani. H. Maming,



Kepala BPIW memaparkan WPS kepada Bupati Tanah Bumbu

Sumber: Dok BPIW

Senin (25/4). Dalam kunjungan tersebut, Mardani mengusulkan beberapa dukungan program pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Program yang diusulkan tersebut, salah satunya Anjungan Cerdas. Dikatakannya bahwa Anjungan Cerdas merupakan program baru secara kewilayahan yang punya prospek. Lokasi Anjungan Cerdas ini berada di jalur nasional yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Selain itu, juga diusulkan dukungan infrastruktur terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batulicin dan Kota Baru. Kemudian juga diusulkan program pembangunan kereta api dari Palangkaraya-Batulicin. Untuk KEK, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah mengajukan usulan ke Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah tersebut juga telah membuat feasibility study atau studi kelayakan untuk pembangunan bendungan di Sungai Kusan, dimana salah satu fungsinya adalah pengendalian banjir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Roy Rizali Anwar menambahkan daerahnya juga memiliki kawasan industri, dimana beberapa pabrik sudah berdiri, seperti pabrik besi dan baja. Namun diakuinya saat mengangkut hasil produksi, perusahaan-perusahaan tersebut

terkendala kondisi jalan dalam kawasan industri dan pelabuhan. "Perusahaan-perusahaan itu bekerjasama dengan pelabuhan swasta yang ada di Batulicin. Transportasinya menggunakan jalan nasional dan jalan kabupaten," ungkap Roy.

Terkait usulan mengenai Anjungan

Diusulkan dukungan infrastruktur terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batulicin dan Kota Baru. Kemudian juga diusulkan program pembangunan kereta api dari Palangkaraya-Batulicin.

Cerdas, menurut Dardak hal ini akan disesuaikan dengan program yang sedang dikerjakan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, yakni berupa perancangan dan pembangunan beberapa Anjungan Cerdas yang terdapat ini WPS Yogya-Prigi-Blitar-Malang, WPS Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai, dan WPS Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Tanjung Api-Api (MBBT). "Anjungan Cerdas untuk tempat istirahat, dan Anjungan Cerdas bisa disebut rest area yang memiliki banyak

kelebihan. Kalau bisa di Anjungan Cerdas ini dipasarkan juga produk lokal, baik seperti makanan tradisional maupun kerajinan khas daerah, karena di anjungan cerdas ini banyak dikunjungi orang dari daerah lain," kata Dardak. Dalam kesempatan itu ia juga menyarankan agar Anjungan Cerdas ini dapat memberikan nilai lebih berupa, pemandangan yang indah, sehingga dapat dinikmati para pengunjung yang datang. "Jadi pengunjung dapat melihat dengan nyaman. Area publik ini juga dapat dilengkapi dengan akses internet," ucap Dardak lagi.

Sedangkan terkait dukungan untuk kawasan industri menurut Dardak, Kementerian PUPR akan mendukung berupa pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan industri tersebut. Pada kesempatan itu Dardak juga menjelaskan mengenai program yang sedang didukung Kementerian PUPR yakni terkait kawasan Banjarbatula atau Banjarmasin-Martapura-Banjar Baru- Batola-Tanah Laut.

Pertemuan itu juga dihadiri beberapa pejabat di lingkungan BPIW seperti Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Benny Hermawan. Selain itu juga dihadiri beberapa pejabat dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. **Hen/infobpiw**

JKPI Minta BPIW Membantu Penyusunan Masterplan Kota Tua

Indonesia memiliki banyak kota tua atau kota yang memiliki bangunan-bangunan tua yang merupakan *heritage* atau cagar budaya. Untuk menjaga dan melestarikan kota tua yang juga berfungsi sebagai tempat kunjungan wisata ini, maka penataannya perlu dibuat modern dan tanpa menghilangkan keaslian dan keunikan bangunan-bangunan yang ada tersebut. Untuk itu diperlukan masterplan untuk seluruh kota tua di Indonesia. Sebagai 'Bappenasnya' Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diharapkan dapat membantu penyusunan masterplan kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan tua.



Lawangsewu, salah satu ikon Kota Pusaka Semarang

Sumber: Istimewa

Demikian disampaikan Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin, saat berkunjung ke BPIW, Rabu (20/4). Lebih lanjut Illiza menjelaskan anggota dari JKPI berjumlah 54 anggota, yang terdiri dari kota-kota yang memiliki kota tua. Dari jumlah tersebut sebagian belum memiliki masterplan.

"Kita minta rencana masterplan kota tua,

karena belum semua kota tua mempunyai masterplan. Hal itu yang kita minta dukungan BPIW. Dengan masterplan semua sudah jelas, siapa dan bagaimana mengelola kota tua tersebut," tutur Illiza.

Selain itu menurutnya dibutuhkan para ahli yang mengerti bagaimana merancang bangunan yang punya nilai historis itu. "Kota tua butuh material lokal dan kualitas bangunan yang sesuai. Sehingga kota tuanya

terasa, tapi tetap bagus," ungkapnya lagi.

Sementara itu Kepala BPIW Hermanto Dardak menyatakan instansinya siap memberi dukungan terkait penyusunan masterplan tersebut. Lebih lanjut Dardak mengutarakan bahwa Kementerian PUPR mendukung pengembangan kawasan *heritage* sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Beberapa satuan administrasi pangkal atau satminkal dapat berperan

seperti Ditjen Cipta Karya terkait penyediaan air dan Ditjen Penyediaan Perumahan dapat mengembangkan penyediaan perumahan di kawasan tersebut. "Kita harus merancang pengembangan kota tua dan kita kordinasikan dengan stakeholder, ini kita lakukan, karena pembangunan infrastruktur saat ini berbasis pengembangan wilayah," tutur Dardak.

Kebudayaan (Kemenko PMK). Dari koordinasi itu disepakati bahwa pengembangan kota tua didorong untuk pengembangan wisata. Selain itu disepakati dibentuknya tim kota pusaka di Indonesia. "Tim ini yang bekerja mengkoordinasikan kota pusaka. Kami minta Kemenko PMK agar ada panduan pengembangan pustaka sesuai kaidah yang diberikan Unesco (*United Nations Educational*

maka akan mendukung satminkal lain seperti Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan pembangunan fisik terkait kota tua tersebut.

Pada kesempatan itu tim dari JKPI, salah satunya Walikota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, A.S. Tamrin yang juga sebagai Ketua JKPI menerangkan bahwa pada 7 Mei mendatang akan dilaksanakan rapat kerja nasional atau Rakernas JKPI di Banda



Foto Bersama Kepala BPIW dengan Bupati Banda Aceh, Bau Bau dan Bogor

Sumber: Dok. BPIW

Saat itu Dardak juga menjelaskan mengenai pelaksanaan Konsultasi Regional atau Konreg yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BPIW, beberapa hari yang lalu. Sebelum pelaksanaan Konreg, dilakukan Pra Konreg di empat kota, yakni Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Dalam kegiatan itu, PUPR mensinkronkan rencana pembangunan di tahun 2017 mendatang.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menambahkan masalah kota tua tersebut sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan

Scientific Cultural Organization,red). Mudah-mudahan jadi langkah awal mendorong kota

"Kita minta rencana masterplan kota tua, karena belum semua kota tua mempunyai masterplan. Hal itu yang kita minta dukungan BPIW. Dengan masterplan semua sudah jelas, siapa dan bagaimana mengelola kota tua tersebut," tutur Illiza.

pusaka di Indonesia. Kita siap mendukung," tegasnya. Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana mengatakan dengan adanya masterplan,

Aceh. Setelah rakernas tersebut, tepatnya pada 10 Mei akan dilaksanakan seminar internasional. Dalam kesempatan itu akan dibahas mengenai beberapa hal, salah satunya terkait pengembangan *heritage*. Pada kesempatan itu, Kepala BPIW diminta sebagai pembicara dalam seminar nasional tersebut. **Hen/infobpiw**

Sumbangsih Pemikiran Perguruan Tinggi Dibutuhkan Terutama Menyangkut Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur



Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana Membuka Acara Seminar Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan pemikiran para ilmuwan di lingkungan perguruan tinggi terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting agar pembangunan bisa efektif dan terukur. Dengan alasan itulah, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW), Dadang Rukmana saat menjadi pembicara pada Seminar Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Selasa (12/4).

Dalam paparannya, Dadang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah digagas oleh Prof. Sutami yang kemudian disempurnakan oleh Prof. Purnosidhi. Kemudian, di tahun 2000 mulai diadakan Konsultasi Regional guna mensinkronkan program-program antar

sektor. Hingga akhirnya, pada tahun 2015 lalu, BPIW terbentuk. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. "Saat ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya didasarkan pada output saja, namun kami juga menentukan bagaimana outcome dan impactnya bagi masyarakat. Untuk itu, BPIW berfungsi untuk mengawal pembangunan infrastruktur yang



Peserta Seminar Pengembangan Infrastruktur Wilayah di UNDIP, Semarang

Sumber: Dok BPIW

terintegrasi antar sektor," tutur Dadang.

Lebih lanjut Dadang menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW menuangkan rencana pengembangan wilayah menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya terdapat lima aspek yang menjadi instrumen dalam pengembangan infrastruktur wilayah. Pertama, rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah ada. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang dipakai dalam pemrograman dan analisis anggaran dari Bappenas. Ketiga, direktif Presiden, seperti program Nawacita yang berasal dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian yang keempat, kebijakan sektor yang muncul diakhir, sebagai contoh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kelima, investasi riil yang ditanamkan oleh swasta di suatu wilayah. Misalnya daerah Sei Mankei di Sumatera Utara yang sudah ditanamkan investasi oleh perusahaan swasta.

"WPS disusun berdasarkan lima aspek tersebut. Dengan pendekatan clustering dari berbagai kawasan yang sedang berkembang. Sehingga ini menjadi konsentrasi kita sebagai basis keterpaduan infrastruktur PUPR,"

ungkap Dadang.

Perwakilan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Bakri Setiawan turut mengapresiasi penyusunan 35 WPS. Menurut Bakri, program itu sejalan dengan keinginan Presiden dalam hal keterpaduan pembangunan. Sementara perwakilan dari Jurusan PWK Undip, Sugiono Soetomo menganggap bahwa dalam pelaksanaan

Seminar yang dihadiri sekitar 200 orang ini disertai dengan video conference yang ditayangkan secara live oleh 60 universitas negeri maupun swasta di Indonesia.

pembangunan, dipengaruhi dua faktor, yakni hukum dan politik. Pembangunan infrastruktur menurutnya sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manusia dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam.

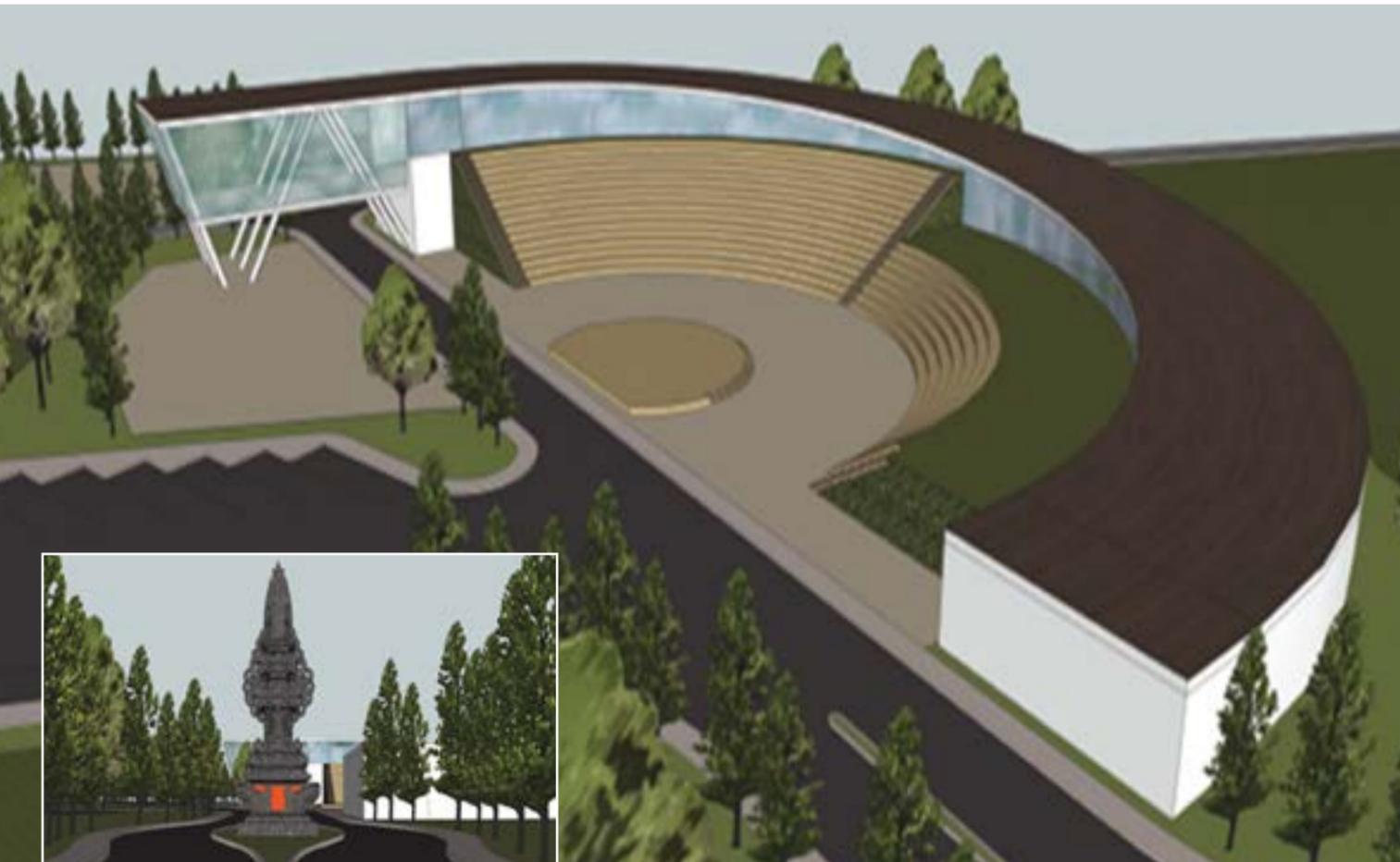
Terkait pelaksanaan seminar, Ketua Pelaksana, Parfi

Khadiyanto menyatakan kegiatan tersebut untuk membahas bagaimana meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah melalui program pengembangan strategis yang berbasis pada keterpaduan infrastruktur.

Acara yang dibagi dua sesi ini menampilkan enam pembicara, pertama, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana yang mewakili birokrasi. Kedua, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Jawa Tengah, Joko Sutrisno. Pembicara ketiga adalah perwakilan dari Jurusan PWK Undip, Sugiono Soetomo. Kemudian pembicara keempat, perwakilan dari Institut Teknologi Bandung, Tommy Firman. Pembicara kelima yakni perwakilan dari UGM, Bakri Setiawan dan pembicara keenam perwakilan dari Undip, Joesron Alie Syahbana.

Seminar yang dihadiri sekitar 200 orang ini disertai dengan video conference yang ditayangkan secara live oleh 60 universitas negeri maupun swasta di Indonesia. (Adn/infobpiw)

Terintegrasi dengan WPS, Anjungan Cerdas Sarana Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah



Konsep Desain Amphitheatre yang akan dibangun di Anjungan Cerdas Rambut Siwi, di Kab. Jembrana Prov. Bali

Sumber: Dok BPIW

Beristirahat ketika melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan, merupakan hal yang penting dilakukan oleh setiap pengendara. Hal ini untuk menghindari kecelakaan dengan menjaga kebugaran ketika kembali melanjutkan perjalanan. Khusus pengemudi kendaraan umum, kewajiban beristirahat itu diatur dalam pasal 90 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi, 'Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam'.

Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut, BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah mengembangkan tempat beristirahat "Anjungan Cerdas" yang merupakan adaptasi dari konsep Michino-Eki di Jepang. Michino-Eki ini merupakan Road Side Station atau stasiun pelayanan pada sisi jalan, yang memiliki keunikan tersendiri. Michino-Eki didesain untuk membangun komunitas dan membangun hubungan antara komunitas lokal dan pengguna jalan. Selain sebagai tempat berbisnis bagi komunitas lokal, tempat ini juga digunakan sebagai tempat untuk penyediaan pelayanan publik seperti layanan kesehatan, aktivitas pendidikan dan kebudayaan serta penyediaan restoran dan layanan komersial.

Sejak diterapkannya konsep ini di Jepang pada tahun 1992, yang mana juga telah diterapkan di beberapa negara seperti, Kenya, Korea Selatan, Thailand, dan Mexico, angka kecelakaan lalu lintas di negara-negara tersebut menurun drastis. Terbukti, dengan metode edukasi dan mengembalikan kondisi kebugaran pengemudi, secara efektif mengurangi resiko kecelakaan.

Bila dilihat dari fungsinya sebagai tempat beristirahat, maka Anjungan Cerdas sama fungsinya dengan rest area yang ada di jalan tol. Namun yang membedakan adalah, Anjungan Cerdas mengembangkan produk lokal, sedangkan toll road rest area tidak demikian.

Pada prinsipnya, Anjungan Cerdas memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, fungsi area atau tempat istirahat. Pada fungsi ini pengendara

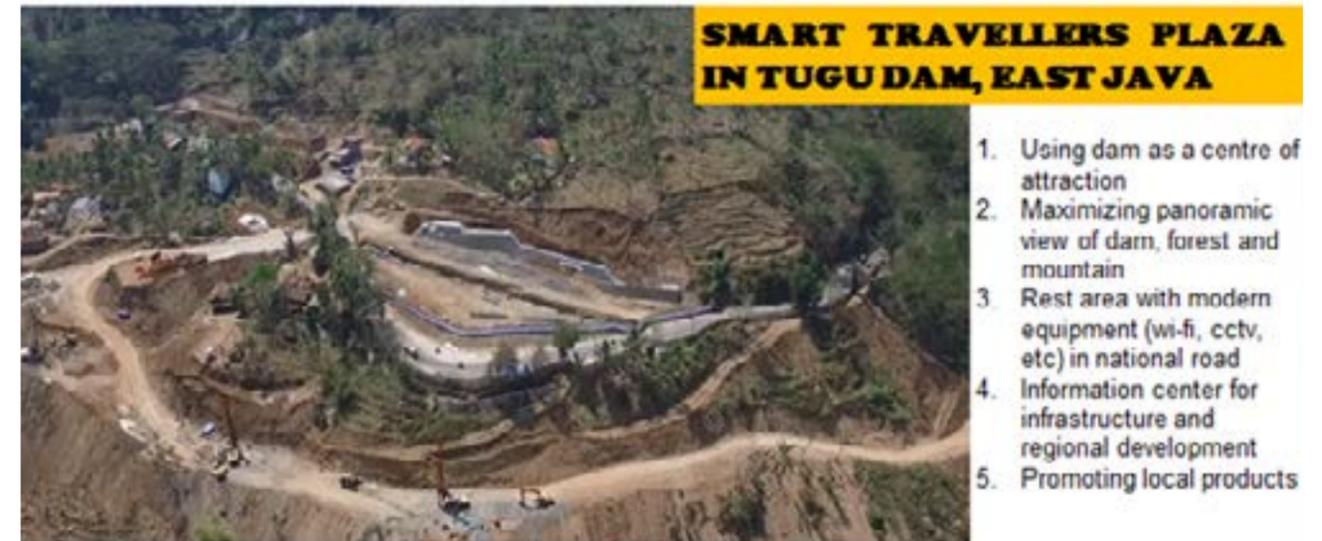
dapat beristirahat guna mengembalikan kebugaran tubuh setelah mengemudi. Salah satu fasilitas yang tersedia adalah toilet dan musholla sepanjang 24 jam dengan sistem keamanan lingkungannya.

Kedua, fungsi edukasi, penyebaran informasi dan pelayanan publik. Anjungan Cerdas rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas information center yang menyediakan informasi terkait wisata dan budaya lokal, pusat home industry produk lokal, pelayanan kesehatan terdekat, serta informasi terkait infrastruktur sekitar. Tempat ini juga memungkinkan dijadikan pusat pembelajaran dan tempat belajar bagi masyarakat dengan tersedianya wi-fi secara gratis.

Ketiga, fungsi inkubasi wilayah. Dengan adanya ketersediaan berbagai fasilitas, baik informasi maupun pelayanan kepada masyarakat, diharapkan Anjungan Cerdas dapat mendongkrak perekonomian wilayah pada umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya. Diharapkan juga Anjungan Cerdas menjadi suatu tujuan wisata baru dengan pemilihan lokasi yang selektif dengan kekhususan tersendiri.

Kementerian PUPR melalui perencanaan yang dibuat oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah memilih beberapa lokasi yang dijadikan pilot project pembangunan Anjungan Cerdas, yakni Anjungan Cerdas Maritim Rambut Siwi di Kab. Jembrana Prov. Bali yang terintegrasi dengan Pelabuhan perikanan Pengambangan, Anjungan Cerdas Tugu di Kab. Trenggalek yang terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Tugu

Anjungan cerdas ini diadaptasi dari Konsep Michinoeki di Jepang. Michinoeki ini adalah Road Side Station atau stasiun pelayanan pada sisi jalan, memiliki keunikan tersendiri.



Lokasi pembangunan Anjungan Cerdas yang akan dibangun BPIW akan terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Tugu oleh BBWS, di Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur

SMART TRAVELLERS PLAZA IN 47,017 KM (+2650 KM) NATIONAL ROADS

Parking & Rest Area



Open Space



Gallery & Observatorium

Gambaran beberapa area yang ada di Anjungan Cerdas Kementerian PUPR yang akan dibangun di jalan nasional di beberapa daerah di Indonesia



Local Product Promotion



Cafe & Restaurant

di Prov. Jawa Timur, Anjungan Cerdas Agro Merek di Kab. Karo yang terintegrasi dengan keindahan Danau Toba di Prov. Sumatera Utara, dan Anjungan Cerdas Wisata Borobudur di Kab. Magelang yang terintegrasi dengan kawasan wisata Candi Borobudur di Prov. Jawa Tengah.

Saat ini, dua pilot project Anjungan Cerdas di Indonesia, yakni di Kab. Jembrana dan Kab. Trenggalek sedang dalam tahap proses pelelangan, yang ditargetkan telah beroperasi pada akhir tahun 2018 mendatang.

Kepala Badan BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengatakan selain sebagai tempat istirahat, melalui Anjungan Cerdas segala potensi daerah dapat dipromosikan kepada para pengunjung. Selain itu masyarakat juga dapat menikmati alam sekitar yang indah. Produk kerajinan tangan khas daerah juga dapat dipasarkan melalui Anjungan Cerdas tersebut. Hal ini penting agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Anjungan Cerdas Maritim Rambut Siwi di Provinsi Bali akan terintegrasi juga dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk – Denpasar – Padang Bai, yang menjadi koridor pengembangan ekonomi kawasan Sarbagita dan kawasan Maritim Bali Barat. Pembang unan area seluas ± 5 Ha ini juga termasuk di dalamnya merevitalisasi rest area milik Pemerintah Provinsi Bali seluas ± 2 Ha di lokasi yang sama yang telah lama terbengkalai.

Fokus dari pembangunan Anjungan Cerdas Rambut Siwi di Pulau Dewata ini adalah selain pengembangan wilayah Bali Barat dan jalan nasional, juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan

yang cenderung ke arah Bali Timur. Selain potensi pemandangan alam, kawasan ini juga memiliki pusat aktivitas keagamaan berupa Pura Luhur, sehingga diharapkan dapat menjadi mesin ekonomi baru di wilayah Kab. Jembrana.

Anjungan Cerdas Tugu yang akan dibangun di Kab. Trenggalek berdampingan dan terintegrasi dengan Bendungan Tugu yang sedang dibangun oleh BBWS Brantas. Anjungan Cerdas yang rencananya dikembangkan di atas tanah sekitar 5 hektar itu, nantinya akan menyajikan pemandangan landscape yang indah dengan borrowing landscape mengarah ke Bendungan Tugu. Anjungan Cerdas ini akan dijadikan salah satu sarana untuk memberikan informasi mengenai bendungan tersebut. Disamping itu, kondisi lahan yang berkontur menjadi salah satu daya tarik dan ciri khas Anjungan Cerdas ini.

"Anjungan Cerdas dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menampilkan view alam sekitar yang indah. Sehingga dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi para pengunjung. Seperti Anjungan Cerdas yang ada di Trenggalek, berdekatan dengan Bendungan Tugu. Disini pengunjung dapat melihat keindahan alam sekitar bendungan tersebut," ujar Dardak beberapa waktu lalu.

Beberapa potensi daerah setempat yang dapat ditampilkan, seperti makanan khas (Gadot dari ketela pohon, nasi tiwul, ayam lodho, dan nasi gegok), produk industri rumah tangga (batik), juga produk perkebunan (cengkeh, jati, tebu, singkong, dan buah naga).

Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009, Kementerian PUPR akan

Bila dilihat dari fungsinya sebagai tempat beristirahat, maka anjungan cerdas sama dengan rest area yang biasa ada di jalan tol. Namun yang berbeda adalah, anjungan cerdas juga mempromosikan produk lokal.



Konsep Desain Anjungan Cerdas

Sumber: Dok BPIW

mengembangkan rest area menjadi Anjungan Cerdas. Dengan kondisi panjang ruas jalan nasional yang mencapai 47 ribu kilometer di seluruh Indonesia, dengan asumsi 1 Anjungan Cerdas setiap 40 km, maka akan terbangun sekitar 1.200 Anjungan Cerdas. Dengan jumlah yang banyak tersebut, maka pembangunan Anjungan Cerdas perlu dipertimbangkan, kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Dengan keikutsertaan pemerintah daerah, terutama dinas pariwisata, KUKM, dinas pertanian dan dinas perindustrian, akan sangat membantu Anjungan Cerdas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Sebagai salah satu trigger dalam pengembangan perekonomian wilayah, Anjungan Cerdas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kawasan yang akan tumbuh yang ada dalam suatu WPS, dengan mempromosikan kawasan tersebut. Contoh, produk yang dihasilkan dari sebuah kawasan agroculture di sebuah WPS tertentu dapat diperkenalkan kepada pengunjung Anjungan Cerdas. Dengan demikian, masyarakat akan mengenalnya dan dapat menjadi daya tarik untuk membeli produk yang dihasilkan.

Selain itu, Anjungan Cerdas juga diharapkan bisa menjadi obyek atau tujuan wisata baru yang menarik, tentu saja dengan sistem pengelolaan yang dilakukan secara profesional. Sistem pengelolaan Anjungan Cerdas saat ini sedang dalam kajian tim konsultan. Diharapkan dari hasil kajian tersebut dapat memberikan gambaran sistem pengelolaan yang terbaik yang dapat dilakukan, sehingga ketika Anjungan Cerdas sudah terbangun, akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam mendorong bergeraknya perekonomian di suatu kawasan.

Ada tiga dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Anjungan Cerdas ini, yakni dampak sosial, transportasi, dan komersil. Dengan adanya fasilitas pengolahan air bersih, pengelolaan air limbah dan persampahan yang baik, Anjungan Cerdas dapat difungsikan sebagai fasilitas dan pusat kesehatan bagi masyarakat. Kemudian, mendorong partisipasi sosial dalam aktivitas ekonomi, dimana masyarakat ikut aktif dalam membeli produk yang ditawarkan. Dampak sosial lainnya adalah penyediaan ruang bagi publik atau masyarakat untuk beristirahat dari perjalanan jauh yang melelahkan.

Dari sisi transportasi, dampak pembangunan Anjungan Cerdas diharapkan dapat mencegah parkir kendaraan dan pemberhentian secara sembarangan yang dilakukan oleh pengguna jalan. Selain itu dapat meningkatkan keselamatan di jalan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tertata rapi di sisi jalan nasional tersebut.

Sementara apabila dilihat dari segi komersilnya, maka ada tiga dampak yang ditimbulkan dari Anjungan Cerdas. Pertama,

meningkatkan jumlah pendapatan dan nilai tambah produk dari sebuah komunitas, seperti komunitas pertanian dan perdagangan. Kedua, meningkatkan standar hidup masyarakat lokal (masyarakat yang tinggal di sekitar Anjungan Cerdas tersebut). Ketiga, mendistribusikan pendapatan antar komunitas.

Dari segi konsep arsitektur Anjungan Cerdas memiliki tiga unsur. Pertama, memenuhi tujuan dan fungsi, yakni fungsi area istirahat, penyebaran informasi, dan fungsi keterhubungan antar wilayah dan inkubator bisnis. Kedua, pada ruang arsitektural (bangunan utama) terdapat ruang rehat makan, minum,relaksasi, ruang display atau ruang promosi, ruang audio video sebagai informasi dan edukasi, ruang pos pemantau bagi instansi terkait untuk memonitor kondisi infrastruktur yang ada, ruang penunjang dan service lainnya, serta bangunan pendukung fungsi Anjungan Cerdas seperti saung/gazebo, MCK, dan amphitheatre.

Ketiga, dari sisi gaya arsitektur baik tradisional, modern, maupun penggabungan dari dua gaya itu, harus dapat memenuhi kebutuhan dan fungsi bangunan dan ruang publik yang aman dan nyaman.

Dalam pengembangan Anjungan Cerdas, ada enam hal yang menjadi kunci pokok. Pertama, adanya pengerak utama dan kepemimpinan,

Bila dilihat dari segi komersilnya, maka ada tiga dampak yang ditimbulkan dari Anjungan Cerdas. Pertama, meningkatkan jumlah pendapatan dan nilai tambah produk dari sebuah komunitas. Kedua, meningkatkan standar hidup masyarakat sekitar. Ketiga, mendistribusikan pendapatan antar komunitas.

dimana harus melibatkan banyak orang meliputi pengendara, komunitas lokal dan pemerintah. Kedua, stakeholder potensial, dimana melibatkan penduduk lokal dan penggerak utama yang dapat berkomunikasi dengan perwakilan stakeholder untuk mengetahui kebutuhan dan kemungkinan kerjasama serta partisipasi dalam perencanaan, pembangunan, dan operasional.

Ketiga, permintaan yang nyata dan jelas yakni harus mendengar aspirasi dan kepentingan masyarakat dan bisnis harus dijalankan secara seimbang. Kemudian yang keempat, manfaat ekonomi dan sosial, dimana dari kegiatan pelayanan dan bisnis harus dijalankan secara seimbang.

Kelima, komitmen dan berkelanjutan, dimana dalam aktivitasnya Anjungan Cerdas tidak hanya diisi oleh fasilitas peristirahatan, namun juga oleh aktivitas sosial, ekonomi sehingga fungsi menyeluruh dapat terwujud dengan penduduk lokal sebagai penyedia utama dalam pelayanan ekonomi tersebut. Selanjutnya keenam, fleksibilitas dalam perencanaan, dimana perencanaan Anjungan Cerdas disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan Anjungan Cerdas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan para pengunjung yang datang. **Dina/Hendra/Tian**

Infrastruktur dan Pengadaan Tanah



Oleh : Ir. I Gde Wayan Samsi G., M. Appl. Sc.
Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kemnterian PUPR



Kawasan Waduk Gondang Solo

Sumber: Kemen PUPR

Pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur, bahkan kegagalan pembangunan itu sendiri. Ketentuan bahwa proses pembangunan infrastruktur harus dimulai dengan pembebasan tanah yang clear dan clean (transparansi dan mengikuti aturan yang ada) telah menjadi prasyarat utama. Bila itu berjalan seperti yang seharusnya, mestinya tanah dapat dibebaskan dan infrastruktur bisa dibangun di atasnya.

Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah perubahan atau reformasi bidang pertanahan untuk memastikan dapat dilakukannya pengadaan tanah untuk pembangunan secara baik dan efisien. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebagai konsekuensi, banyak aturan turunannya telah menyesuaikan dengan perubahan ini, sehingga sehingga pengadaan tanah menjadi lebih mudah pelaksanaannya dan jelas batas waktunya.

Perubahan yang sangat signifikan diantaranya pembagian tugas kewenangan yang tadinya dilakukan oleh panitia adhoc, sekarang dilakukan oleh lembaga, sehingga menjadi lebih terstruktur. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak lagi hanya menjadi beban satu lembaga, tetapi melibatkan secara tegas lembaga yang menjadi pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Posisi lembaga yang bertanggung jawab dalam proses persiapan dan menetapkan lokasi pembangunan, pelaksana pengadaan dan melakukan penyerahan hasil menjadi lebih jelas dan fokus. Dengan adanya tanggungjawab pada setiap tahapan proses ini, kualitas output pada setiap proses dapat ditingkatkan untuk menjamin kelancaran seluruh proses.

Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang membutuhkan tanah sangat jelas, yaitu melakukan perencanaan pengadaan tanah, termasuk mempersiapkan dokumen perencanaan pengadaan, memfasilitasi persiapan, pelaksanaan, dan menerima hasil. Setelah

itu melakukan pengamanan dan pengelolaan tanah sebagai Barang Milik Negara atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan peran ini, berhasilnya para petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempersiapkan dokumen yang dapat diterima dan memenuhi persyaratan secara tepat waktu menjadi kunci keberhasilan dan kelancaran pengadaan tanah. Dukungan hasil studi yang solid, ketersediaan dokumen pendukung, seperti Studi Kelayakan, Dokumen Pengelolaan Lingkungan, dan data perencanaan yang akurat tidak dapat ditawar lagi. Karenanya, proses perencanaan yang terstruktur, terkontrol, dan memiliki validasi yang kuat harus dipastikan telah dilakukan dengan baik sebelum dokumen perencanaan pengadaan tanah disampaikan kepada lembaga yang melaksanakan proses berikutnya.

Pengadaan tanah di lingkungan Kementerian PUPR, dilakukan pada lima satminkal. Kelima satminkal itu adalah Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Ditjen Sumber



Pembangunan sebuah lahan untuk infrastruktur waduk

Sumber: Kemen PUPR

Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya mengadakan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, sedangkan Ditjen Penyediaan Perumahan dan BPIW mengadakan tanah untuk tujuan pencadangan tanah bagi keperluan pembangunan rumah khusus, serta area inkubasi dan anjungan cerdas.

Berkaitan dengan target keterpaduan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). BPIW bertugas memastikan ketersediaan tanah yang akan dipakai untuk membangun infrastruktur strategis, termasuk dan perumahan yang akan dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan Demikian, BPIW sehingga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan tanah di WPS dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengadakannya. BPIW, melalui Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, kemudian memonitor secara teratur ketersediaan tanah ini serta melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pengadaan tanah sehingga keterpaduan pembangunan dapat dipastikan.

Dalam posisinya sebagai pembantu Menteri, BPIW bertugas untuk melakukan monitoring dan fasilitasi pengadaan tanah seluruh infrastruktur PUPR. Dalam Konteks ini, Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan komunikasi secara intensif dengan Sekretariat Jenderal (Biro PBMN), Bagian Pengelolaan BMN dan Fasilitasi Pengadaan Tanah, Sesditjen SDA, Subdit Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga, Satker Pembangunan di Lingkungan BBPJJN/BPJN Ditjen Bina Marga,

Satker Ditjen Cipta Karya, dan Subdit Fasilitasi Pengadaan Tanah Ditjen Penyediaan Perumahan. Untuk keperluan monitoring, BPIW telah mempersiapkan dan mengelola sebuah Sistem monitoring berbasis aplikasi yang diberi nama sebagai Sistem Monitoring Tanah (Simonah) PUPR.

Prosedur pemutakhiran data yang saat ini masih manual dan penerbitan data dua kali

Untuk keperluan monitoring, BPIW telah mempersiapkan dan mengelola sebuah Sistem monitoring berbasis aplikasi yang diberi nama sebagai Sistem Monitoring Tanah (Simonah) PUPR.

setahun dalam tahun 2016 ini akan digantikan oleh Simonah yang dapat melakukan pemutakhiran secara online. Mulai bulan Mei 2016, sistem yang berbasis aplikasi online ini disosialisasikan dan diujicobakan pemanfaatannya. Input data yang tadinya harus diminta ke lapangan, sekarang dapat dilakukan secara langsung di lapangan sekaligus dapat memastikan seluruh salinan dokumen proses dan bukti-bukti penyerahan hak atas tanah tersimpan pada system komputasi awan PUPR. Harapannya dalam 1 tahun ke depan sistem ini sudah diformalkan. Rencananya Simonah tidak hanya dimanfaatkan untuk data tanah yang masuk di anggaran

PUPR, namun juga tanah yang dibebaskan oleh daerah. Jadi PPK daerah yang membebaskan tanah untuk kepentingan infrastruktur PUPR juga turut berpartisipasi untuk melakukan self-reporting melalui Simonah.

Sebagai bagian dari upaya fasilitasi, BPIW memastikan dibangunnya jejaring kerja dan hubungan yang bagus antara instansi yang terlibat dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Salah satunya, bagaimana memastikan terjaganya hubungan dengan BPN, Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi lainnya. Termasuk dalam tugas ini BPIW memastikan tersedianya tools yang digunakan petugas PPK dalam melaksanakan tugas-tugas pengadaan tanah tersebut. BPIW pada tahun ini pula sedang mempersiapkan Pedoman dan Standar Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang nantinya dapat dijadikan pegangan oleh setiap petugas pengadaan tanah dan PPK yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah

dalam melaksanakan tugasnya. Penguasaan terhadap dan kemampuan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diharapkan akan menjadi salah satu kompetensi wajib bagi setiap anggota Satker atau PPK yang terlibat atau dalam pelaksanaan bagian tugas pembangunannya termasuk mengadakan tanah.



Pantai Ora, Hidden Paradise di Kota Ambon

Ora Beach Resort dengan pemandangan lepas pantai yang indah

Sumber: BPIW

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi banyak pantai indah dan menunggu Anda menyambanginya. Salah satu pantai di Maluku Tengah yang patut untuk dikunjungi adalah Pantai Ora. Pantai Ora sendiri termasuk ke dalam WPS 30 yaitu Ambon-Masohi. Kementerian PUPR dengan berbasis WPS tersebut akan mendukung peningkatan aksesibilitas jalan menuju ke Destinasi Wisata yang dikenal hingga mancanegara tersebut.

Pantai Ora terletak di bagian utara tengah Pulau Seram, persis di cerukan Pulau Seram di area Teluk Sawai, tepatnya di Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Di pantai ini terdapat sebuah resort bernama Ora Beach Resort yang memiliki 8 buah cottage dan semuanya terbuat dari kayu beratap jerami. Setiap cottagenya bisa memuat sampai 3-6 orang. Tidak perlu khawatir jika cottage tersebut penuh. Selain 8 cottage yang berdiri di atas laut, terdapat pula cottage lainnya yang berada di dataran di pinggir pantai tersebut.

Ora Beach Resort merupakan satu-satunya penginapan yang berdiri tepat di atas perairan Pantai Ora. Istimewanya dari resort ini adalah latar belakang cottage

yang merupakan Perbukitan Taman Nasional Manusela. Perpaduan cottage kayu yang berdiri di atas air jernih berwarna hijau kebiruan dan latar belakang perbukitan hijau menjadikan pemandangan di Pantai Ora begitu fantastis. Sejauh mata memandang, pesona keindahan pantai ini layak disejajarkan dengan pantai-pantai indah lainnya seperti Pantai Boracay di Filipina atau Pantai Bora-Bora di Samudera Pasifik.

Pantai Ora terletak di bagian utara tengah Pulau Seram, persis di cerukan Pulau Seram di area Teluk Sawai

Penginapan di Ora Beach Resort tidak dihitung berdasarkan biaya per kamar namun per orang dan berubah sesuai musim yaitu berkisar antara Rp1.000.000,- Rp1.500.000,- per harinya. Nominal harga tersebut sudah termasuk transportasi dari Pelabuhan Tulehu ke Ora Beach Resort dan makan tiga kali sehari. Harga ini masih bisa ditawarkan jika Anda berkunjung ke resort ini dalam kelompok. Sebelum menuju Pantai

Ora, sebaiknya Anda melakukan booking terlebih dahulu mengingat keterbatasan jumlah kamar yang ada.

Untuk menuju ke Pantai Ora Anda bisa mengambil penerbangan ke kota Ambon, dilanjutkan dengan kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu ke Pelabuhan Amahai (Masohi) harga tiket VIP Rp. 150.000,- dan tiket ekonomi Rp. 92.000,- dan waktu tempuh sekitar 2 jam. Sesampainya di desa Masohi Anda akan disambut dengan anak-anak setempat yang berebut memanggul barang dari dermaga ke kapal tingting dengan wajah polos, rambut keriting dan senyum khas Maluku yang membawa keceriaan bagi siapa saja yang melihatnya.

Kemudian Anda akan melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Amahai dengan jalan darat yang memakan waktu sekitar 2 jam hingga ke Desa Sawai. Dari Desa Sawai tinggal menyebrangi dermaga sekitar 10 menit saja dengan kapal kecil, dan Anda sudah tiba di Pantai Ora!

Sesampainya Anda menapakkan kaki di dermaga Ora Beach Resort, Anda akan menemukan betapa banyaknya koral di area perairan, sedemikian dekat dengan garis pantai maka disaat air surut di malam hari

sebagian koral ini keluar dari permukaan hingga tertutup laut pasang di keesokan harinya. Yang menarik, air tawar dari perbukitan mengalir dan bersatu dengan air laut persis di area belakang cottage sehingga menimbulkan perpaduan air tawar dan air laut. Saat snorkeling pun langsung terasa aliran air hangat yang berganti dingin terus menerus.

Dalam kunjungannya, tim liputan bulletin Sinergi BPIW melihat pesona lain dari pantai ini adalah kehidupan biota lautnya. Terumbu karang atau koral di pantai ini beraneka ragam dan berwarna warni begitu juga dengan ikannya. Karena airnya yang begitu jernih, koral dan ikan-ikan yang sedang berenang kesana kemari bisa Anda lihat langsung dari atas perahu, sungguh menakjubkan. Ketika cuaca cerah pemandangan di Pantai Ora sangat indah bahkan saat malam hari. Bayangkan, Anda duduk di dermaga dan menikmati kerlap kerlip bintang di langit yang bersinar layaknya mutiara. Karena lokasinya yang terpencil atau jauh dari keramaian, pantai ini sangat cocok bagi Anda yang mendamba ketenangan serta melepas lelah dari kesibukkan sehari-hari.



Ora Beach Resort, satu-satunya penginapan di Pantai Ora

Sumber: BPIW

Wilayah Pertumbuhan Strategis 1 Sabang - Banda Aceh - Langsa

ULTIMATE WPS 1 SABANG-BANDA ACEH-LANGSA 2025



ULTIMATE

Program Ultimate pada WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa sampai tahun 2025 direncanakan akan mendukung pembangunan berbagai akses diantaranya: dua bandara, yaitu: Bandar Udara internasional Sultan Iskandar Muda di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar serta Bandar Udara Maimun Saleh (Kelas III) di Sabang, Pulau Weh. Dua Pelabuhan yaitu: Pelabuhan Utama (PP) serta Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh sebagai pelabuhan pengumpul (pp) serta akses jalan express atau jalan tol Banda Aceh-Medan dengan panjang 470,80 KM yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.

Untuk pembangunan Bendungan, direncanakan akan mendukung pembangunan empat bendungan, yaitu Bendungan Paya Seunara dengan volume 1,09 Juta m² yang bermanfaat untuk air baku, Bendungan Keureuto dengan volume 215,94, Bendungan Rukoh dengan volume 128,66 juta m² dan Bendungan Tiro dengan volume 128,66 Juta m². Ketiga bendungan tersebut bermanfaat untuk irigasi, reduksi banjir, air baku dan listrik. Dan akan dikembangkan Perumahan serta infrastruktur Cipta Karya Terpadu di Simpul-simpul perkotaan.

Di WPS tersebut juga akan dikembangkan kawasan strategis, antara lain Kawasan Industri Ladang (pertanian dan Perkebunan, Kawasan In-

dustri Bireun, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Weh Dsk dengan daya tarik bentang alam.

PROGRAM UTAMA (TAHUN 2017)

Pelebaran jalan akan dilakukan di beberapa tempat yaitu: Pelebaran Jalan Krueng Raya-Bts. Kota Banda Aceh, Pelebaran Jalan Lambaro-Batas Pidie, Pelebaran Jalan Lambaro-Blang Bintang dan Pelebaran Jalan Lambaro-Blang Bintang. Selain itu juga akan laksanakan pembangunan Jalan BORR (Banda Aceh Outer Ring Road) Koridor Utama.

Ditahun 2017 juga di targetkan untuk pembangunan IPAL Kawasan Kota Banda Aceh, Pembangunan SPAM MBR Kawasan Sp. Dodik-Sp. Lamajame, Pembangunan SPAM MBR Kws. Langsa Timur, Pembangunan SPAM MBR Kws. Langsa Lama dan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ulee Lheue.

Pembangunan Pengamanan Pantai juga di laukan di Pantai Krueng Raya Kec. Masjid Raya di Kab. Aceh Besar Sepanjang, dan Pembangunan Pengamanan Pantai Ladang Kec. Masjid Raya di Kab. Aceh Besar Sepanjang, serta pembangunan Bendungan Tiro.

Dukungan Perumahan dalam bentuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni yang terfasilitasi melalui bantuan PSU di Kota Sabang juga menjadi salah satu program utama pada WPS ini.

Wilayah Pertumbuhan Strategis 2 Metro Medan - Tebing Tinggi - Dumai - Pekanbaru

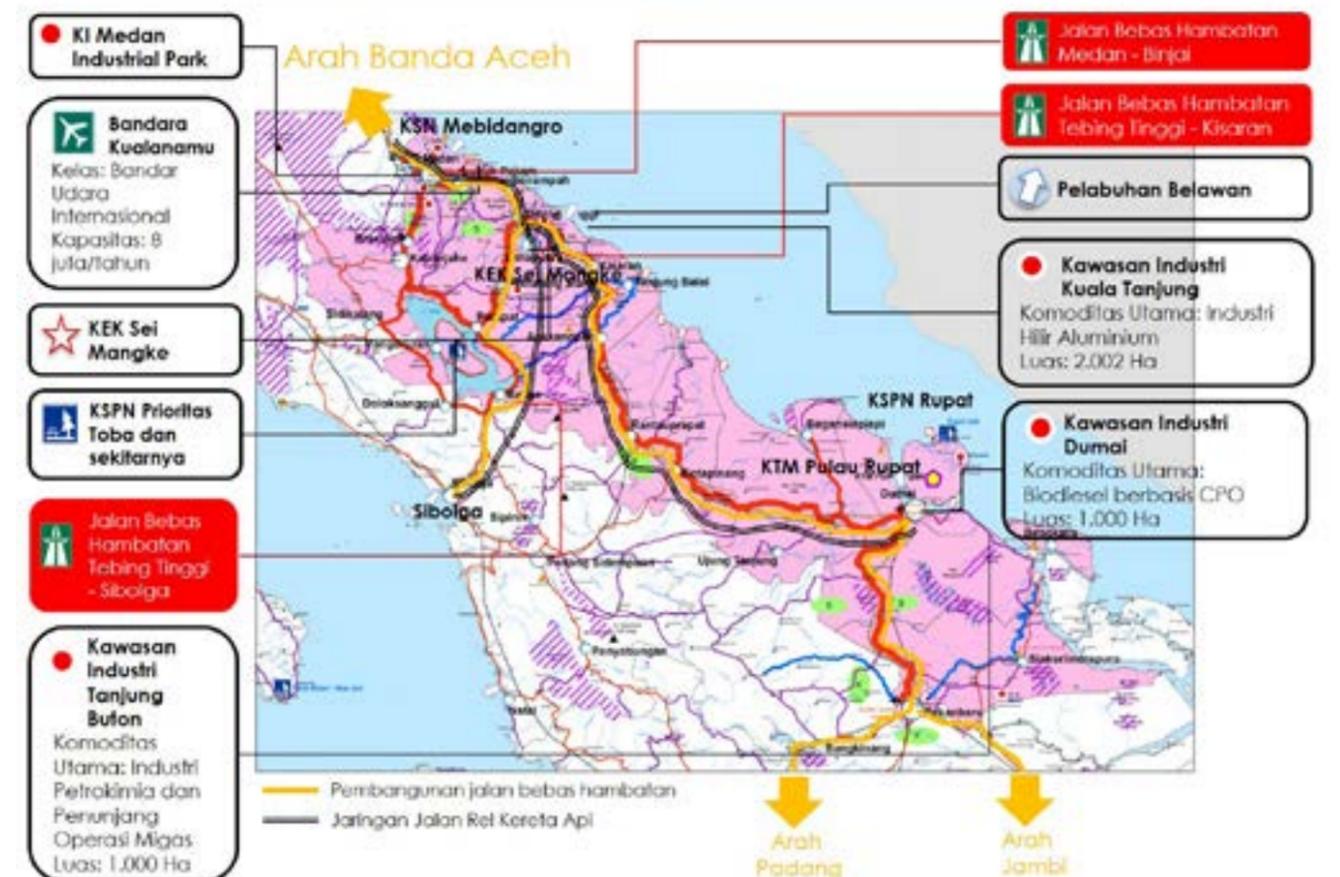
ULTIMATE

program ultimate pada Wilayah Pengembangan strategis (WPS) 2 Metro Medan- Tebing Tinggi-Dumai-Pekan Baru sampai tahun 2025 direncanakan akan mendukung pembangunan berbagai akses diantaranya: Bandara Kualanamu dengan kelas Bandar Udara Internasional berkapasitas 8 juta/tahun, Pelabuhan Belawan, serta akses jalan express atau jalan bebas Hambatan Medan-Binjai, Tebing Tinggi-Kisaran, dan Tebing Tinggi-Sibolga. Pada WPS 2 juga akan di kembangkan empat Kawasan Industri, yaitu: Kawasan Industri Medan Industrial Park, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Industri Dumai, serta Sei Mangke yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk kawasan pariwisata, Danau Toba menjadi salah satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

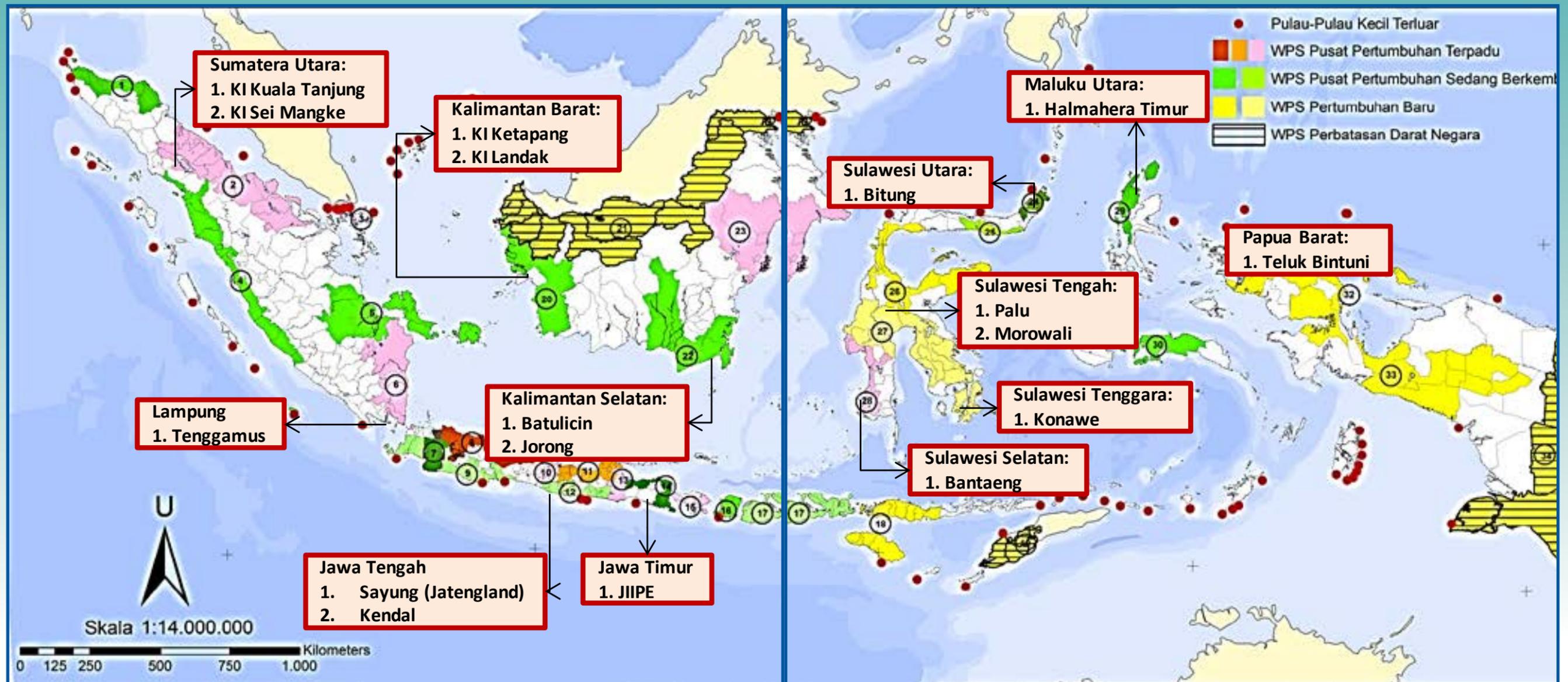
PROGRAM UTAMA (TAHUN 2017)

Program Utama yang dirancang tahun 2017 yaitu pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Binjai (lanjutan/lahan), Medan Kuala Namu-Tebing Tinggi-Kisaran (lanjutan/ pembebasan lahan), Tebing-Tinggi-Pemantang Siatar (pembebasan lahan), pembangunan Fly Over Sei Mangke, serta Peningkatan Kapasitas Jalan Dumai-Pelitung. Dari segi perairan akan dikembangkan Sistem Pengelolaan Air Baku Kawasan Industri Dumai, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Baku KEK Sei Mangke, dan Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Asahan dan Kota Tanjung. Serta dukungan dari sisi perumahan dalam bentuk Pembangunan Rumah Susun Industri Kawasan Industri Dumai dan Pembangunan Rumah Susun Industri di KEK Sei Mangke.

ULTIMATE WPS 2 METRO MEDAN – TEBING TINGGI – DUMAI – PEKANBARU TAHUN 2025



Keterpaduan terhadap Pengembangan 15+2 Kawasan Industri (KI) Prioritas 2015-2019

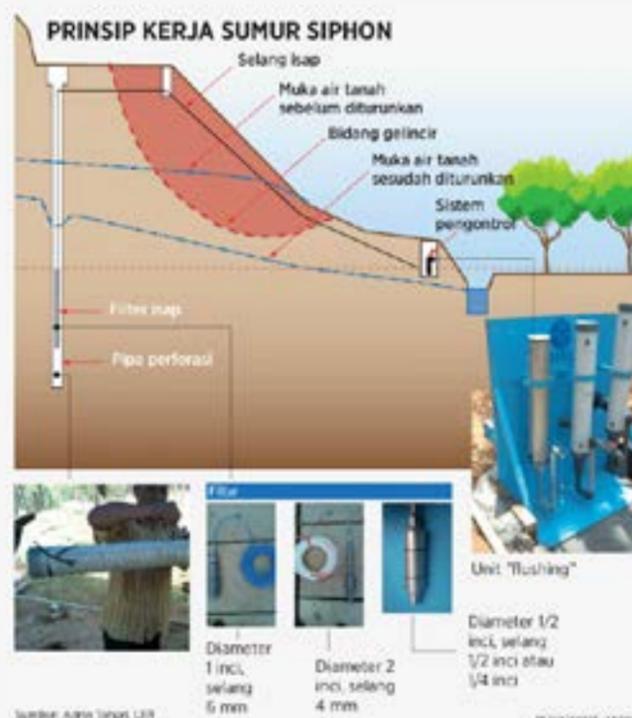


Pada saat ini terdapat 74 KI dan direncanakan dikembangkan 47 KI dengan prioritas 15 KI Berdasarkan hasil Multilateral Meeting dengan Bappenas dan KL terkait (Maret 2016), disepakati tambahan 2 KI prioritas yaitu KI Kendal Jawa Tengah dan KI Jorong Kalimantan Selatan sehingga total menjadi 17 KI.

Didalam 35 WPS terdapat keterpaduan dengan pengembangan 15+2 Kawasan Industri Prioritas 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR akan mendukung pembangunan di kawasan industri tersebut.

THE GREATEST

Teknologi Pencegah Longsor Buatan Anak Bangsa



Memasuki musim penghujan banyak terjadi hujan yang lebat dan angin kencang. Hujan tidak jarang menyebabkan banjir maupun tanah longsor di berbagai tempat di tanah air. Bahkan tidak jarang terdapat korban jiwa akibat longsor.

Bencana longsor kerap terjadi di daerah yang tidak memiliki kestabilan lereng. Tidak stabilnya lereng sering kali terjadi akibat beban yang diterima terlalu berat sehingga perlu dilakukan penanganan khusus untuk mencegah bencana. Untuk penanganan tersebut tim peneliti geoteknologi dari LIPI telah membuat alat bernama "The Greatest" Teknologi Gravitasi Ekstraksi Air Tanah untuk Stabilisasi Lereng.

Alat ini merupakan hasil kreasi Arifan Jaya Syahbana dan timnya yang sempat dipamerkan dalam Geotechnology Science Week (GSW) November lalu di Bandung. Teknologi ini terbilang mudah untuk dibuat karena menggunakan material yang sering ditemui sehari-hari, namun untuk pengoperasiannya membutuhkan perhitungan ilmiah yang

akurat. Teknologi pencegah longsor juga dikembangkan bersamaan dengan sistem drainase siphon yang telah digunakan untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan lereng tanah pasir selama sepuluh tahun terakhir di Eropa.

Siphon adalah bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan grafitasi melalui bagian bawah saluran pembuang, cekung, anak sungai atau sungai.

"Material yang digunakan dalam teknologi ini memang mudah didapatkan. Namun untuk memastikan alat ini bekerja, tetap harus mengikuti perhitungan fisika," jelas Arifan seperti dikutip dari lipi.go.id Cara kerja alat ini adalah dengan mengeluarkan air muka tanah pada titik elevasi yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur air permukaan tanah yang sering kali dianggap sebagai penyebab longsor. Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian tim The Greatest terhadap pergerakan tanah, yang menyimpulkan terdapat dua penyebab longsor. Pertama, karena penjernihan tanah di permukaan lereng. Kedua, akibat kenaikan air permukaan tanah. Penanganan penyebab pertama tidak terlalu kompleks. Namun, kenaikan air permukaan tanah patut menjadi perhatian serius.

Naiknya air permukaan tentu mengakibatkan longsor dalam. Alat inilah yang akan membuang kelebihan air permukaan tersebut.

Air permukaan tanah yang berlebih di lereng akan terdistribusi ke dalam selang pembuangan yang harus dipastikan terbebas dari udara. Apabila udara masuk, penyedotan harus



Sistem siphon atau the greatest yang berfungsi di UPT, BIKK Karangasung (Geotek 17/3/2015)



Salah satu jalan yang terkena dampak longsor

diulang.

Teknologi ini berusaha untuk mengalirkan air dari lereng ke dataran yang lebih rendah berdasarkan prinsip gravitasi. Sebagai gambaran, kerja sistem pembuangan air permukaan tanah di lereng ini kurang lebih sama dengan pemindahan bensin dalam tangki motor ke dalam botol menggunakan selang secara manual. Hanya, kapasitas air yang mengalir dengan menggunakan The Greatest akan berhenti dalam kondisi

yang ditentukan. Alat ini akan berhenti bila air di lereng sudah menyusut kembali ke ketinggian air permukaan normal atau setimbang.

Meski bisa diterapkan di daerah rawan longsor, alat ini hanya bisa bekerja di kedalaman 9,8 meter air permukaan tanah.

Untuk memastikan alat ini bisa bekerja, perhitungan harus tetap dilakukan pada bidang gelincir di titik-titik lereng yang telah ditentukan.

Faktor penting lain yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ini adalah perhatian pada konstruksi sumur siphon.

Sumur harus dibuat sebersih mungkin. Pemasangan elevasi awal harus akurat dan disesuaikan dengan kondisi gerakan tanah yang terjadi. Jalur berliku dan

sambungan harus diminimalisasi. Perawatan selang pun perlu benar-benar intensif dan rutin terutama di daerah yang mengandung tanah berbutir halus. **(INI)**

sumber:
LIPI <http://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/01/11/teknologi-pencegah-longsor-buatan-anak-bangsa>

Meski bisa diterapkan di daerah rawan longsor, alat ini hanya bisa bekerja di kedalaman 9,8 meter air permukaan tanah. Untuk memastikan alat ini bisa bekerja, perhitungan harus tetap dilakukan pada bidang gelincir di titik-titik lereng yang telah ditentukan.



Bahaya longsor di permukiman

Sumber: Istimewa

Konsultasi Regional 2016

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg), di Jakarta pada 19 April lalu. Dalam kesempatan itu ditekankan tiga prioritas yang harus dilakukan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, deregulasi untuk mempercepat semua perijinan, dan pengembangan sumber daya manusia.



Seremoni pembukaan Konreg 2016



Suasana Konreg di gedung Kementerian PUPR



Suasana pendaftaran peserta Konreg



Peserta sedang mengikuti jalannya Konreg

AGRINEX 2016

BPIW Kementerian PUPR turut serta dalam pameran sektor pertanian, yakni Agrinex Expo, yang dilaksanakan di JCC Senayan Jakarta, pada 1-3 April 2016. Dalam pameran tersebut, BPIW mensosialisasikan program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang berbasis pengembangan wilayah. Saat itu juga disosialisasikan dukungan PUPR terhadap pembangunan sektor pertanian.



Para pengunjung di stand BPIW



Stand BPIW



Staf humas BPIW sedang memberikan informasi tentang WPS



Agrinex Expo dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan

Istilah Tentang Lahan

Berbicara infrastruktur, tentu tidak akan dapat dipisahkan dengan penggunaan lahan untuk membangunnya. Seringkali kendala lambatnya progres pembangunan disebabkan karena sulitnya proses pembebasan lahan dan karena tingginya harga tanah di wilayah tertentu. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan lahan, dan apa saja jenis lahan yang ada di Indonesia? berikut ini beberapa istilah tentang lahan yang dihim-pun dari Kamus Penataan Ruang:



Pembukaan lahan baru di Merauke

Sumber: Kemen PUPR

Lahan:

Bentuk fisik alam, terdiri atas tanah, air, udara yang dapat digarap (Land Area)

Lahan Basah:

Wilayah yang tergenang air, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar, asin, atau payau

Lahan kritis:

1. Kondisi lahan yang membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air, alam, serta lingkungan
2. Lahan yang sudah tidak lagi subur ditanami

Lahan Parkir:

Area terbuka selain jalan, digunakan untuk parker kendaraan (parking lot)

Lahan pertanian pangan abadi:

Kebijakan tentang tata penggunaan tanah, dalam hal ini pemerintah mengalokasikan 15 juta hektar lahan sawah, ditambah 15 juta hektar lahan tegalan, hanya boleh digunakan untuk kegiatan pertanian, tidak diizinkan dikonversi dalam bentuk bentuk penggunaan lain

Lahan potensial:

Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan hasil pertanian yang tinggi dengan biaya yang rendah

Lahan potensial kritis:

Tanah yang masih produktif untuk usaha pertanian yang jika dalam pengelolannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah,

tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semikritis atau lahan kritis

Lahan produktif:

Tanah terbuka atau tanah garapan yang mampu memberikan produksi dalam jumlah besar

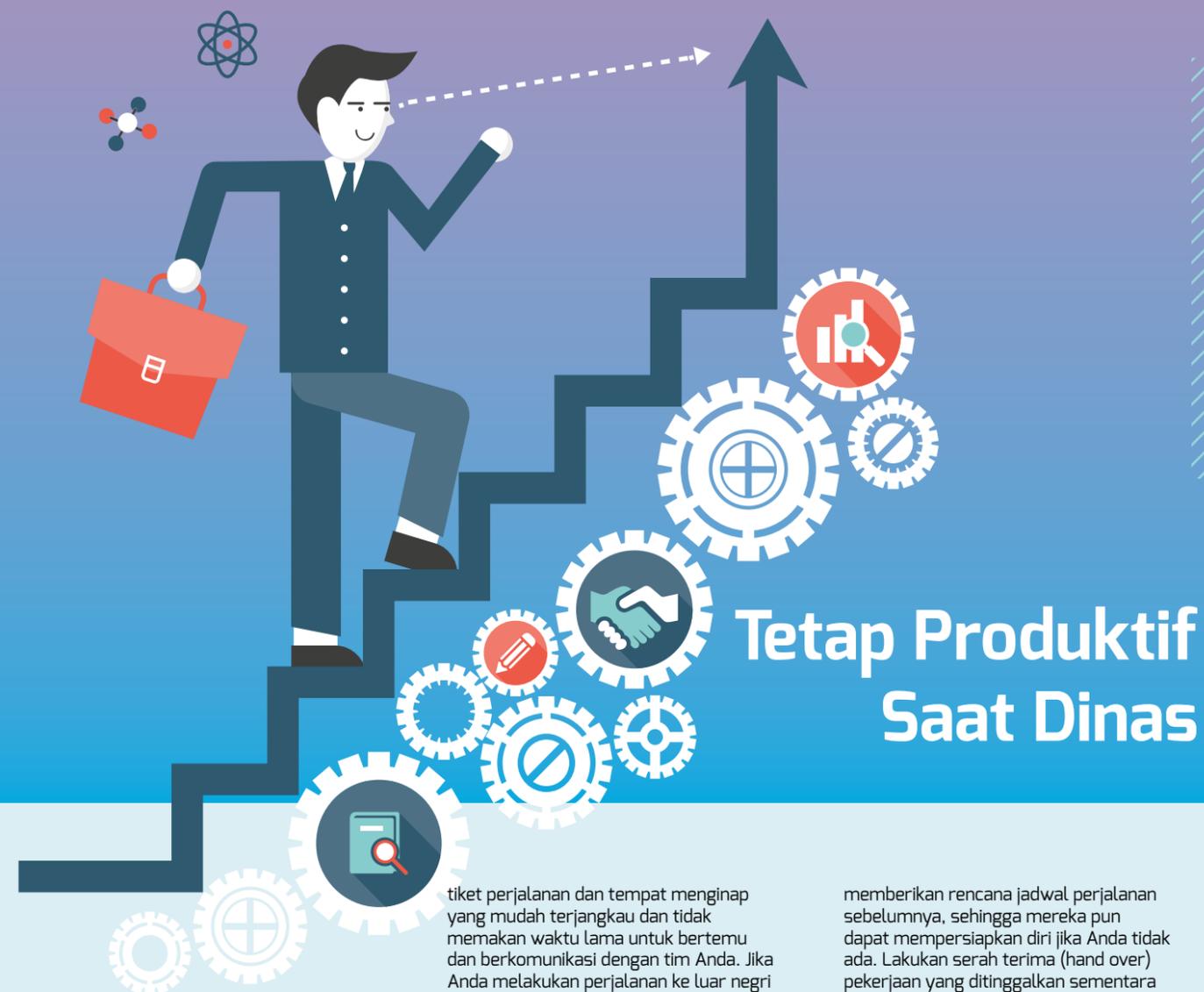
Lahan semikritis:

Tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, produktivitasnya relatif rendah.

Lahan tidur:

Lahan yang sementara waktu belum dimanfaatkan (vacant land)

Sumber: Kamus Penataan Ruang



Tetap Produktif Saat Dinas

Perjalanan Dinas sudah menjadi bagian dalam sebuah manajemen strategi membangun hubungan kerja dengan mitra kerja di daerah lain. Selain itu, perjalanan dinas juga bertujuan untuk meninjau secara langsung pekerjaan di daerah lain. Maka perjalanan dinas ke daerah-daerah masih perlu dan tetap dibutuhkan sebagai konsolidasi dan koordinasi langsung. Permasalahan yang mungkin muncul saat melaksanakan perjalanan dinas adalah bagaimana Anda tetap produktif selagi melakukan perjalanan atau sudah berada di tempat yang dituju sementara tugas dan kewajiban di daerah asal tetap termonitor baik.

1. Perjalanan Dinas yang Cerdas

Sebelum Anda melakukan perjalanan dinas, maka pastikan rencana perjalanan Anda, sehingga tetap efektif dan efisien. Siapkan jauh hari sebelumnya, mulai dari obat-obatan pribadi, peralatan elektronik, kebutuhan mandi dan lainnya. Siapkan

tiket perjalanan dan tempat menginap yang mudah terjangkau dan tidak memakan waktu lama untuk bertemu dan berkomunikasi dengan tim Anda. Jika Anda melakukan perjalanan ke luar negeri maka pastikan Anda tidak terganggu dengan proses-proses imigrasi dan administrasi lainnya, seperti paspor, visa dan lainnya.

2. Dekat dengan Teknologi

To do list dapat Anda buat dalam telepon genggam dibandingkan tertulis dalam buku. Akses Anda terhadap data melalui teknologi sangat krusial, agar tidak tertinggal akan informasi penting yang berdampak pada pekerjaan yang Anda tinggalkan. Komunikasi dengan rekan kerja atau kolega jangan sampai terputus hanya karena Anda kurang mempersiapkan baterai telepon, dan jika perlu Anda dapat membawa powerbank meski baterai telepon sudah penuh 100%.

3. Pastikan Kebutuhan Kerja Anda

Sementara Anda meninggalkan pekerjaan, maka pastikan orang-orang terkait memiliki informasi yang mereka perlukan. Tidak salah kiranya Anda

memberikan rencana jadwal perjalanan sebelumnya, sehingga mereka pun dapat mempersiapkan diri jika Anda tidak ada. Lakukan serah terima (hand over) pekerjaan yang ditinggalkan sementara Anda melakukan perjalanan dinas.

4. Penuhi Kebutuhan Emosional Anda

Perjalanan dinas terkadang dapat membuat energi mental Anda terkuras dan berakibat stress. Untuk itulah tetap diperlukan komunikasi dengan keluarga atau teman dekat agar saling berbagi. Hubungi mereka disaat Anda tengah lelah dengan pekerjaan dan lakukan percakapan yang santai mengenai perjalanan Anda. Perjalanan dinas juga membutuhkan energi fisik yang prima, agar tetap sehat dan bugar, Anda perlu beristirahat pada waktunya, makan makanan yang sehat, selain itu jika memungkinkan tetap melakukan aktivitas fisik, seperti olah kebugaran, berenang atau jogging.

Sumber: <http://ikhtisar.com/bagaimana-anda-tetap-produktif-selama-perjalanan-dinas/>

Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Mendukung Percepatan Swasembada Pangan

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

Rektor Institute Pertanian Bogor

Pembangunan infrastruktur menjadi program unggulan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan demikian, infrastruktur dibangun untuk semua sektor, termasuk sektor agriculture atau pertanian. Pembangunan infrastruktur sektor pertanian ini mendapat tanggapan dari seorang akademisi, yakni Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. Sebagai pakar pertanian, Suhardiyanto berpendapat bahwa, pembangunan sistem ketahanan pangan nasional yang sedang diban-

Suhardiyanto berpendapat bahwa, pembangunan sistem ketahanan pangan nasional yang sedang dibangun pemerintah, harus diperkuat secara holistik.

gun pemerintah, harus diperkuat secara holistik. Bila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa hal seperti biaya transportasi untuk sampai ke konsumen akan menjadi mahal dan biaya produksi pun naik. Padahal di satu sisi, saat ini merupakan era kompetisi, dimana telah bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan adanya pasar bebas Asia Tenggara tersebut, daya saing Indonesia harus ditingkatkan melalui pembangunan di semua sektor. Dalam membangun infrastruktur sektor pertanian ini Suhardiyanto perlu keterpaduan dan dukungan dari berbagai instansi termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Keterpaduan pembangunan infrastruktur ini dapat mendukung mempercepat swasembada atau usaha mencukupi kebutuhan sendiri pada sektor pertanian. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah menyatakan bahwa swasembada pangan ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan.

"Bagaimanapun swasembada pangan akan sangat terkait dengan kelancaran arus barang. Ketika infrastruktur jalan dibangun, maka akan membantu kelancaran arus barang," tutur Suhardiyanto saat ditemui di sebuah pameran pertanian, di Senayan, Jakarta, awal April lalu. Dikatakannya juga bahwa dengan pembangunan infrastruktur itu, maka roda perekonomian di setiap daerah akan terus tumbuh dan berkembang. Membangun infrastruktur tidak selalu dikonotasikan dengan proyek yang besar dan yang dibangun dalam kurun waktu

yang lama. Dalam pemikiran Suhardiyanto, pembangunan infrastruktur justru sangat berarti, ketika bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sehari-hari, misalnya membangun jalan setapak yang selalu dilewati setiap orang sehari-hari, atau membangun jembatan sederhana, sehingga dapat memudahkan anak-anak untuk bersekolah.

"Banyak sekali cerita anak sekolah yang harus menyeberang sungai, karena jembatannya belum dibangun. Negara harus hadir dengan membangun jembatan atau jalan yang memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Jadi yang infrastruktur yang kecil-kecil seperti ini harus direspon cepat, karena sangat dibutuhkan masyarakat," ucapnya lagi.

Sebagai badan yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menurutnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, dapat menyusun program infrastruktur jangka pendek tersebut, sehingga dapat dirasakan langsung masyarakat.

Hendra Djamal



Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter



KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:

www.bpiw.pu.go.id

 **@informasiBPIW**

 **Layanan Informasi BPIW**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**